

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi usaha para anggota organisasi serta memberdayakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikatakan suatu proses, karena semua manajer dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.

Berkaitan dengan manajemen dalam sebuah organisasi Allah berfirman dalam Q.S. Ash Shaff ayat 4:

﴿مَرَّصُونَ نَجِينَ كَأَنَّهُمْ صَفَا سَبِيلِهِ فِي يُقْتَلُونَ الَّذِينَ تُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

*"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh."*¹

Dari ayat di atas, dapat di lihat bahwa segala sesuatu yang ditata secara teratur maka akan menghasilkan kekuatan padanya. Segala sesuatu membutuhkan penataan atau pengelolaan, begitu juga pembiayaan dalam

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30* Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h.805.

sekolah yang merupakan salah satu komponen terpenting penunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Pengelolaan tersebut dilakukan supaya biaya yang ada dapat digunakan secara bijak sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan menjadikan kokoh lembaganya.

Upaya peningkatan mutu sebuah lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Manajemen akan berjalan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai dalam mendukung kegiatan proses belajar mengajar, pembiayaan yang cukup, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu dari komponen di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka efektivitas pengelolaan lembaga tersebut kurang optimal.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang

tercapainya tujuan pendidikan.² Manajemen pembiayaan diharapkan menjadi kekuatan utama bagi lembaga dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada madrasah swasta untuk dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lain.

Disadari bahwa anggaran pembiayaan bukan merupakan satu-satunya faktor penentu agar pendidikan lebih berkualitas, namun tanpa pembiayaan yang cukup akan sulit mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Karenanya dalam melaksanakan kegiatannya sekolah/madrasah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.³

Dalam kaitanya dengan pembiayaan, masyarakat berasumsi bahwa semakin mahal biaya pendidikan maka semakin bagus pula kualitas pendidikannya. Dengan mahalnya biaya tentunya apa yang diperoleh peserta didik akan terjamin baik dari fasilitas maupun mutu pendidikannya. Disamping itu, ada pula lembaga yang memungut biaya yang tidak begitu mahal namun pembangunan dan kualitas pendidikan tetap terjaga sehingga masih banyak masyarakat yang memilih dan mempercayai lembaga tersebut sebagai tempat putra-putrinya menuntut ilmu. Tentu saja hal tersebut dapat

² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 47-48.

³ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan : Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan sekolah/Madrasah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h. 331

terjadi karena pembiayaan yang dilakukan dikelola dengan baik, sumber dana yang ada menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaannya.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa lembaga ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diminati oleh masyarakat. Hal ini tergambar dari banyaknya calon siswa baru yang setiap tahunnya melebihi kuota penerimaan. Sebagai madrasah swasta Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau berupaya dengan keterbatasan dana yang ada membangun institusi pendidikan Islam sehingga dapat bersaing dengan beberapa sekolah-sekolah negeri lain yang berada di Kecamatan Kahayan Kuala. Madrasah ini memiliki pembiayaan dan daya saing yang cukup baik diantara madrasah swasta yang lain. Ditambah lagi dengan melaksanakan sekolah gratis bagi seluruh siswa, dapat menarik simpatik dan kepercayaan yang luar biasa bagi masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka dalam mengenyam pendidikan sebagai bekal mereka mengarungi kehidupan dimasa yang akan datang.⁴

Berbagai macam kegiatan pendidikan yang harus dilaksanakan oleh MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau seperti pengembangan kegiatan kesiswaan/ekstrakurikuler, pengembangan bangunan dan sarana prasarana yang masih kurang memadai, pembayaran gaji dan kesejahteraan guru masih dibawah standar biaya umum, tentunya semua

⁴Dokumen Profil Madrasah MTs Hidayatullah Tahun 2018

program tersebut memerlukan operasional dan pembiayaan yang memadai agar dapat mendukung pelaksanaannya.

Sementara dana yang diharapkan untuk memenuhi semua keperluan tersebut hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terkadang tidak mencukupi, bahkan sering minus anggaran untuk setiap tahunnya, sementara madrasah tidak berusaha untuk mendapatkan dana lain yang bersumber dari masyarakat atau orang tua siswa untuk memenuhi pembiayaan kegiatan tersebut. Padahal banyak kegiatan pendidikan yang masih perlu pembiayaan.

Semenjak diberlakukannya 8 standar nasional pendidikan yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang di berlakukan pemerintah, maka setiap sekolah atau madrasah harus berbenah memenuhi delapan standar tersebut, agar dapat eksis dan diakui keberadaannya. Dari delapan standar tersebut bagi MTs Hidayatullah standar pembiayaanlah yang merupakan tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan, bagaimana tidak, komunitas peserta didik yang 90% dari keluarga kurang dan tidak mampu, harus memperoleh pendidikan yang layak dengan pelayanan terbaik. Belum lagi banyak program unggulan madrasah yang memerlukan pembiayaan besar dan pengelolaan yang serius dan benar. Program tersebut untuk menunjang keberlangsungan dan ketertarikan siswa dalam belajar agar kelak mereka mempunyai bekal dan keterampilan hidup yang cukup dan cakap.

Menurut informasi yang disampaikan oleh kepala madrasah, pihak lembaga/madrasah pernah berusaha memanfaatkan sumber dana dari masyarakat/orang tua siswa untuk membantu pembiayaan dimadrasah yaitu dalam bentuk bantuan uang bangunan bagi siswa baru yang mendaftar dan biaya SPP yang dibayar setiap bulan. Namun banyak calon siswa yang mendaftar kemudian mengundurkan diri dan lebih memilih mendaftar ke sekolah lain yang berada di kecamatan tersebut yaitu sekolah umum yang berstatus Negeri (SMPN) dengan alasan bahwa disekolah tersebut tidak memungut iuran/biaya apapun dari siswa. Sehingga pada saat itu jumlah siswa sangat berkurang.⁵

Akhirnya pihak yayasan dan kepala madrasah serta seluruh dewan guru MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau dengan niat untuk memajukan pendidikan Islam dan dalam rangka meningkatkan daya saing dengan sekolah-sekolah negeri yang berada di wilayah ini bersepakat, tidak lagi memungut biaya apapun dari masyarakat/orang tua siswa. Terbukti mulai saat itu minat masyarakat untuk mendaftar di madrasah ini semakin tahun semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya siswa yang mendaftar di madrasah ini maka dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima akan semakin meningkat pula.

Berbeda sekali kalau dibandingkan dengan sekolah/madrasah yang berada diperkotaan, biaya pendidikan diperkotaan sangatlah mahal, untuk masuk sekolah setingkat TK/RA saja dibutuhkan biaya yang lumayan tinggi. Sehingga

⁵Observasi awal Pelaksanaan Manajemen Keuangan di MTs Hidayatullah

tidak terjangkau bagi masyarakat dikalangan bawah. Adanya kesenjangan pembiayaan antara sekolah/madrasah dikota dan didesa ini sangat menarik perhatian penulis, sementara sekolah/madrasah didesa dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan bermutu dengan biaya yang terjangkau bahkan gratis. Maka dalam hal ini kepala madrasah dan pengelola lembaga dituntut mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendidikan seoptimal mungkin. Agar kegiatan dan agenda madrasah tetap berjalan maka diperlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu agar semua kegiatan berjalan lancar dan terprogram.

Dipilihnya Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau sebagai tempat penelitian, berdasarkan Fakta serta pemaparan di atas sangat menarik untuk peneliti ungap dalam penelitian ini dengan judul **“Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.”**

Melalui penelitian ini peneliti berharap mendapatkan gambaran bagaimana kepala madrasah dan pengelola lembaga dapat mengelola dan mengatur pendanaan pembiayaan pendidikan yang tidak seberapa,tetapi mampu membiayai seluruh kegiatan pendidikan di madrasah tersebut secara efektif dan efisien dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang berada diwilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen pembiayaan pada madrasah swasta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ?
3. Bagaimana pengendalian pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mendeskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
2. Mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

3. Mengkaji dan mendeskripsikan pengawasan pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khazanah keilmuan, baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Memberikan kontribusi keilmuan bagi pendidikan, khususnya tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan, konsep dan tuntunan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi kepala madrasah/sekolah dan pengelola lembaga pendidikan dalam rangka mengoptimalkan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta guna peningkatan kualitas pendidikan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Definisi Manajemen

Efektivitas dan efisiensi sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi oleh manajemen yang dilakukan. Manajemen yang dilakukan adalah dalam rangka mencapai tujuan lembaga.

George R. Terry memberikan pengertian bahwa manajemen adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengalaman dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

SP. Melayu Hasibuan menggambarkan bahwa manajemen adalah sebagai ilmu dan seni proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Non Manusia (SDNM) secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁷

Selanjutnya menurut Saefullah, Islam menetapkan bahwa manajemen merupakan aktifitas yang berlandaskan nilai-nilai keadilan yang merupakan perbuatan pimpinan yang tidak menyakiti atau menzalimi bawahan. Dalam

⁶George R. Terry dikutip oleh Husaini Usman, *Manajemen : Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013, h. 24.

⁷SP. Melayu Hasibuan dikutip oleh Tubagus Achmad Daridjat, *Konsep-Konsep Dasar Manajemen Personalia Masa Kini*, Bandung : PT. Reflika Aditama, 2015, h. 24.

Islam, unsur kejujuran dan kepercayaan sangat penting diterapkan dalam manajemen.⁸

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah tindakan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kepemimpinan dan pengawasan/evaluasi berlandaskan nilai-nilai keadilan.

Dalam manajemen serangkaian kegiatan sebagaimana dikemukakan di atas dijabarkan dalam fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan yang dilakukan dalam manajemen.

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Stephen P Robbins dan Mary Coulter adalah :

“ Today, these functions have been condensed to four : planning, organizing, leading, and controlling.”⁹

Fungsi-fungsi manajemen telah diringkas menjadi empat yaitu : perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan.

⁸ Saefullah, U, KH, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, h..49.

⁹Stephen P Robbins and Mary Coulter, *Management Eleventh Edition*, America : Prentice Hall, 2012, h.9.

2. Manajemen Keuangan / Pembiayaan Pendidikan

a. Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga manajemen pembiayaan pendidikan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pegawai yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan anggaran, penggunaan atau pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban uang (dana) pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan yang dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Dalam perspektif manfaat, manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan mengelola dana untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien.¹⁰

Banyak pihak memahami manajemen itu diidentikkan dengan pengelolaan, termasuk Depdiknas menggunakan istilah pengelolaan keuangan pendidikan sebagai tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan yang ada di lembaga pendidikan.

¹⁰Rukaiyah dikutip oleh Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung : Widya Padjadjaran, 2017, h. 22.

Jauh sebelumnya sudah dimaknai pengelolaan keuangan pendidikan merupakan usaha memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam urusan layanan pendidikan.

Dari berbagai pemahaman tentang manajemen keuangan pendidikan maupun pengelolaan keuangan pendidikan. Pada pokoknya dapat disederhanakan pemahamannya. dimana pengelolaan keuangan pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3komponen utama, yaitu

- 1). Perencanaan keuangan (*financialplanning*) mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa efek samping yang merugikan.
- 2). Pelaksanaan (*implementation involves accounting*), yaitu kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat.
- 3). Evaluasi berupa penilaian terhadap pencapaian tujuan dari yang Didanai.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik sintesis, manajemen keuangan pendidikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur mengelola keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan. Adapun kegiatan inti yang ada dalam manajemen keuangan

¹¹ Jones dikutip dalam, Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar, Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung : Widya Padjadjaran, 2017, h. 23.

pendidikan bisa dikelompokkan dalam tiga hal, yaitu: penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*auditing*). Jika ketiga komponen ini dilakukan secara profesional maka manajemen keuangan pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien, guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Nanang Fattah Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain.¹²

Sementara itu Sulistiyorini memaknai manajemen keuangan dalam arti sempit yang berarti pembukuan. Sementara itu dalam arti luas manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggung jawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah, maupun kepada pemerintah pusat, dimulai dari perencanaan,

¹²Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, h. 78.

pengorganisasian, pelaksanaan, sampai kepengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.¹³

Senada dengan sulistiyorini, David Wijaya menyebutkan, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.¹⁴ Manajemen keuangan pendidikan merupakan kegiatan pengurusan atau ketatausahaan keuangan meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian manajemen keuangan pendidikan dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.¹⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan Menurut Bafadal dalam Agustinus Hermino manajemen keuangan memiliki fungsi sebagai berikut: (1) perencanaan anggaran tahunan, (2) pengadaan anggaran, (3) pendistribusian anggaran, (4)

¹³Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Elkaf, 2006), h.98.

¹⁴David Wijaya, *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah*, Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur, 2009, h. 82-83.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, 2003, h. 34.

pelaksanaan anggaran, (5) pembukuan keuangan, (6) pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.¹⁶ Selanjutnya menurut Agustinus, fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni: menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni (1) Kepala sekolah; data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengevaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan, (2) Guru dan Karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun dan peluang kerja, (3) kreditur, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat di bayar manakala jatuh tempo, (4) orang tua siswa; bermanfaat bagi orang tua siswa untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah, (5) pemasok (*supplier*). Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo, (6) pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya, (7) masyarakat. Membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait

¹⁶Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning* (Jakarta: Gramedia, 2013), h. 186

pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.¹⁷

Menurut Sulistiyorini, Fokus manajemen keuangan pendidikan adalah memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran sekolah, mengelola sekolah berdasarkan rencana dan anggaran tersebut dan memfungsikan masyarakat untuk terlibat aktif berpartisipasi mengelola sekolah.¹⁸

c. Tujuan Manejemen Keuangan Pendidikan

Tujuan manajemen keuangan pendidikan adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya.¹⁹ Di samping itu Tim Dosen Administrasi Pendidikan FIP UPI Bandung menjelaskan bahwa ada beberapa tujuan manajemen keuangan pendidikan, antara lain :

- 1). Menjamin agar dana yang tersedia dapat dipergunakan untuk kegiatan lembaga pendidikan dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
- 2). Memelihara barang - barang (aset) sekolah

¹⁷*Ibid.* h. 186-187.

¹⁸Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 56

¹⁹Sobri Sutikno dikutip oleh Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : Widya Padjadjaran, 2017, h. 23.

3).Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.²⁰

d. Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pendidikan

Menurut Arwildayanto dkk, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan terdiri dari empat aspek kegiatan yakni : penyusunan atau perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.

1. Perencanaan Anggaran (*Budgeting*)

Budgeting adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan kedalam penampilan operasional yang dapat di ukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis *cost eff ectiveness*, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam penyusunan anggaran pengelola keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selain itu, pengelola keuangan juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : (1) Hemat sesuai dengan kebutuhan, (2) terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, (3) tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar.

²⁰*Ibid*

2. Pembukuan (*Accounting*)

Pembukuan (*accounting*) dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua hal : *Pertama*, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha. *Kedua*, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, hendaknya kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Berikut ini beberapa hal yang perlu dikenalkan pada staf berkaitan dengan pembukuan keuangan sekolah: buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, neraca percobaan.

3. Pemeriksaan (*auditing*)

Pemeriksaan. (*auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Terdapat beberapa bentuk *auditing* yakni: (1) pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan merupakan

informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. (2) pemeriksaan (*audit*) operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi.

4. Pertanggung Jawaban

Pertanggung jawaban adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi *stakeholder* lembaga pendidikan. Menurut Arwildayanto dkk, Pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diberikan sesuai dengan keperluan mulai setiap triwulan sekali, satu tahun sekali atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Laporan keuangan ini diantaranya dapat ditujukan kepada: (1) kepala dinas pendidikan, (2) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD), dinas pendidikan daerah dan lain-lain.²¹

e. Sumber-Sumber Keuangan Pendidikan

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 46 ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

²¹Arwildayanto, Nina Lamatenggo dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung : Widya Padjadjaran, 2017, h.30.

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.²² Hal ini juga disebutkan oleh Sulistiyorini bahwa secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya (2) Orang Tua Siswa (peserta didik) (3) Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat.²³

a. Pemerintah

Sumber keuangan dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dengan dana rutin. Dana dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta didik kelas I, II, dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan anggaran tersebut. Selain DIK pendanaan dari pemerintah juga diberikan kepada setiap sekolah berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah.

²²Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

²³Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009, hal. 130.

b. Orang Tua Siswa

Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat. Pendanaan ini disebut juga dengan istilah iuran komite yang besarnya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya dana komite dibedakan menjadi tiga jenis yakni, (1) Dana tetap bulanan. Adalah pendanaan yang wajib dibayar oleh orang tua peserta didik setiap bulannya selama menjadi peserta didik. (2) Dana incidental merupakan pendanaan yang diwajibkan kepada peserta didik baru dan pada umumnya hanya dibayarkan satu kali selama menjadi peserta didik. (3) Dana sukarela. Adalah pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik.

c. Masyarakat

Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah.

d. Dana dari alumni

Dana dari alumni adalah pendanaan yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam

bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri untuk mengajar sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih kepada lembaga pendidikan karena sudah memberikan ilmunya dan sebagai bentuk pembekalan diri terhadap dunianya yang baru terjun dalam dunia pendidikan. Dana ini dapat diterima dari alumni yang diberikan secara langsung oleh individu maupun kelompok baik melalui acara perkumpulan para alumni maupun lustrum sekolah.

e. Dana Dari Peserta

Kegiatan Dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumberkan dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Seperti kegiatan yang diperuntukkan untuk peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dan pendanaannya melibatkan guru, atau kegiatan ekstrakuler yang diberikan kepada peserta didik untuk pengembangan diri sesuai dengan bidang yang diinginkan peserta didik seperti kegiatan pengembangan diri tata boga, tata busana, pramuka, dan lainlain.

f. Dana Dari Kegiatan Kewirausahaan Sekolah

Banyak sekolah-sekolah saat ini yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Kewirausahaan sekolah dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sekolah sendiri seperti peserta didik maupun guru, dan staf atau dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Seperti koperasi, kantin, fotokopi, bazar tahunan, perkebunan, toko serba ada dan lain-lain.

f. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan madrasah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.²⁴

Disamping itu, efektifitas, juga perlu mendapatkan penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.²⁵

²⁴Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Departemen Agama RI: 2007, h. 29.

²⁵Direktorat Tenaga Kependidikan, *Materi Pembinaan Profesi Kepala Sekolah/Madrasah*, Departemen Pendidikan Nasional, 2007, h. 9 – 17.

a. Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan disekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui sejumlah uang dan penggunaanya yang diterima

sekolah dari orang tua siswa. Perolehan informasi ini manambah kepercayaan orang tua siswa terhadap madrasah.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berartipenggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rencana kegiatan sekolah yang telah ditetapkan dan juga peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang sesuai peruntukannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya transparansi para penyelenggaraan sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- 2) Adanya standar kinerja jadi setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

- 3) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektifitas

Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Kompri mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, efektivitas tidak sampai pada ketercapaian tujuan akan tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan pada tujuan dan visi misi lembaga.²⁶ Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas manakala kegiatan yang diselenggarakan mampu mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan dan kualitas *outcomes* nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

c. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*out put*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya.²⁷ Segi penggunaan daya, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah

²⁶Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, Jakarta: Kencana, 2017, h.16

²⁷*Ibid.*

direncanakan. Dilihat dari segi hasil kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya tertentu mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas. Manajemen keuangan pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.²⁸(1) Prinsip keadilan. Pelaksanaan prinsip keadilan yaitu : besarnya pendanaan pendidikan, (dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat) yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. (2) Prinsip Efisiensi, mengarah pada perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran atau antara daya (waktu, pikiran, biaya) dengan hasil. (3) Prinsip transparansi, artinya menekankan adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, baik dari segi sumber keuangan pendidikan, jumlahnya, rincian kegunaannya, maupun pertanggung jawabannya. Secara keseluruhan harus jelas dan sesuai dengan kenyataannya dan pelaksanaannya. (4) prinsip akuntabilitas publik. Artinya penggunaan keuangan sekolah harus dapat dipertanggung

²⁸Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

jawabkan, pengeluaran harus sesuai dengan perencanaan sekolah yang telah ditetapkan.²⁹

g. Tugas Pengelola Keuangan Pendidikan

Menurut Djoened Rastavara dalam pelaksanaan manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas, yakni otorisator ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban.³⁰ Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah memiliki fungsi sebagai otorisator dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Adapun bendahara melaksanakan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran.

²⁹Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan, h. 184.

³⁰Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, Jakarta: Kencana, 2017, h.158

Manajer keuangan sekolah memiliki tugas untuk menentukan keuangan sekolah mulai dari cara mendapatkan dana, hingga pemanfaatan dana. Berikut ini diantara beberapa tugas manajer keuangan sekolah: (1) Manajemen untuk perencanaan perkiraan, (2) manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya, (3) manajemen kerjasama dengan pihak lain, (4) penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya.³¹

3. Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Pengelolaan bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan atau biaya. Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya.

Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan,

³¹*Ibid.*, h. 158-159.

pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan.³²

Manajemen memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), dan tahap pelaksanaan (*akunting*), dan tahap penilaian atau auditing.³³

a. Perencanaan Pembiayaan (*Budgeting*)

Perencanaan biaya disebut juga dengan penganggaran (*budgeting*), menurut Nanang Fattah penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Anggaran sebagai rencana operasional yang dalam satuan uang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Pada dasarnya penyusunan anggaran merupakan negosiasi perundingan antara puncak pimpinan dengan pimpinan dibawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran.³⁴

Menurut George R. Terry, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan pembuatan serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

³²Martin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 25.

³³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 257.

³⁴Nanang Fattah dikutip oleh Ocdon dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017, h. 78.

Selanjutnya menurut Ramayulis bahwa Perencanaan itu meliputi penentuan prioritas agar pelaksanaan pendidikan berjalan efektif, prioritas kebutuhan agar melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pendidikan, masyarakat bahkan murid. Penetapan tujuan sebagai garis pengarah dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan. Formulasi prosedur sebagai tahap-tahap rencana tindakan, penyerahan, tanggung jawab kepada individu dan kelompok kerja.³⁵

Memperhatikan Alqur'an surah Al-Hasr ayat 18, perencanaan bukan saja terkait dengan aspek duniawi semata tetapi sampai kepada yang ukhrawi.³⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Utari bahwa dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan anggaran sekolah dengan langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya
- b. Inventarisasi sumber pembiayaan
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).³⁷

³⁵ Ramayulis, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, h. 271

³⁶ Kamrani Buseri, *Administrasi Manajemen Pendidikan Islam, Paradigma, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, h. 135.

³⁷ Utari dikutip oleh Imam Gunawan dan Djum Djum Noor benti, *Manajemen Pendidikan: Suatu Pengantar Praktek*, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 370.

Kemuadian menurut Ahmad. S, dalam menyusun rencana keuangan/pembiayaan pendidikan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :³⁸

1. Perencanaan harus realistis, perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana/fasilitas, daya/tenaga, dana, ataupun waktu.
2. Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/volume kegiatan sekolah yang kompleks.
3. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan.
4. Perencanaan harus *fleksible*. Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi.
5. Perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap melalui suatu penelitian.

³⁸Ahmad. S, diakses melalui http://akhmad_sudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsepdasar-manajemen-keuangan-lembaga-pendidikan. 5 November 2018. Pkl.19.00.wib.

6. Perencanaan akan menghindari *under* dan *over planning*. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan biaya adalah analisis yang akurat terhadap kebutuhan sumber dana demi tercapainya tujuan. Perencanaan biaya disebut juga dengan penganggaran. Penganggaran merupakan suatu kegiatan perencanaan dan koordinasi dari berbagai sumber kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam periode tertentu melalui analisis perkiraan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai.

Menurut Mucharsyah Sinungan penyusunan rencana (*planning*) didalam setiap penggunaan anggaran. Langkah pertama dalam penentuan rencana pengeluaran keuangan adalah menganalisa berbagai aspek yang berhubungan erat dengan pola perencanaan anggaran, yang didasarkan pertimbangan kondisi keuangan, *life of business*, keadaan para nasabah/konsumen, organisasi pengelola, dan *skill* para pejabat pengelola. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi : Perencanaan anggaran, strategi mencari sumber dana, penggunaan keuangan sekolah, pengawasan dan evaluasi anggaran, dan pertanggung jawaban.³⁹

³⁹Mucharsyah Sinungan, *Dasar-Dasar Manajemen Kredit*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993

Ada dua aktivitas dalam penganggaran, yaitu penentuan sumber anggaran dan alokasi anggaran. Sumber-sumber potensial yang mungkin dapat digali harus juga disebutkan dalam membuat rumusan. Alokasi anggaran dibuat berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan disusun serealitas mungkin. Penganggaran merupakan aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan (*financial resources*) yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Menyusun anggaran dana yang disesuaikan dengan program kerja sekolah dan jumlah dana.

Garton dan Scneider mengemukakan penyusunan anggaran sekolah harus memperhatikan *performance budgeting*, yaitu konsep penganggaran yang menitikberatkan segi yang ingin dicapai dan menjadi prioritas. Sekolah menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RAPBS), dibahas oleh berbagai pihak yang berwenang untuk disetujui dan disahkan dalam periode satu tahun. Pengelolaan pendidikan sekolah dalam segala aktivitasnya memerlukan sarana prasarana, layanan, pelaksanaan program sekolah, dan penggajian, kesemuanya tersebut memerlukan anggaran.⁴⁰

Lebih jauh Nanang Fattah menjelaskan dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mendasarkan perhitungan pada

⁴⁰Garton dan Scneider dikutip oleh Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek*, Bandung : Alfabeta, 2017, h. 37.

keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.⁴¹

Morphet dikutip oleh Mulyasa menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan adalah:⁴²

1. Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
2. Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif.
3. Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Perencanaan pembiayaan memerlukan perhatian khusus dari para administrator dan manajer. Perencanaan pembiayaan harus diperhitungkan secara seksama agar apa yang direncanakan tersebut tepat guna dan tepat sasaran sehingga tujuan pendidikan akan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam hal pembuatan perencanaan keuangan madrasah yang efektif dan strategis, maka yang bertanggung jawab sebagai manajer adalah kepala madrasah. Kepala madrasah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi administrative. Penyusunan

⁴¹Nanang Fattah, *Ekonomi dan...h. 54.*

⁴² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006 h. 196

perencanaan (RAPBM) memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Pelaksanaan Pembiayaan (*Actuating*)

Actuating adalah kegiatan menggerakkan dan mengusahakan agar para pekerja/pelaksana melakukan tugas dan kewajibannya. Senada dengan hal tersebut, Ali Mufron mengemukakan aktuating adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberikan penjelasan, petunjuk serta bimbingan kepada orang-orang yang menjadi bawahannya sebelum dan selama melaksanakan tugas.

Kurniadan dan Machali mengemukakan penggerakan (*actuating*) adalah tindakan untuk memulai, memprakarsai, memotivasi, dan mengarahkan, serta mempengaruhi para pekerja mengerjakan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi penggerakan dalam manajemen mencakup kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan bentuk-bentuk lain dalam rangka mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan organisasi.⁴³

Dalam sistem manajemen pendidikan Islam pergerakan adalah dorongan yang didasari oleh prinsip-prinsip religious kepada orang lain, sehingga orang tersebut mau melaksanakan tugasnya dengan sungguh-

⁴³Kurniadan dan Machali dikutip oleh Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek*, Bandung : Alfabeta, 2017, h. 81.

sungguh dan semangat.⁴⁴ Lembaga pendidikan Islam dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan :

1. Hemat sesuai dengan kebutuhan
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
3. Tidak menggunakan dana untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar.⁴⁵

Pada proses pelaksanaan ini, perencana pendidikan tinggal mengatur bagaimana menjalankan /menggerakkan perencanaan pembiayaan pendidikan yang telah diperinci kedalam pengorganisasian anggaran pendidikan, dengan berpedoman bahwa penggunaan anggaran pendidikan sesuai apa yang telah ditetapkan dalam RAPBM/S. Dalam hal ini pelaksana adalah bendahara madrasah yang harus mencatat keluar masuknya pergerakan pembiayaan pendidikan.

Dalam melaksanakan anggaran pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang tepat dan sesuai dengan sumber daya - sumber daya yang diperoleh. Biaya pendidikan yang didapat dari sumber – sumber dana kemudian dipergunakan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Dalam mengalokasikan dana pendidikan biasanya memperhatikan komponen-komponen siswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot-bobot tujuan pendidikan,

⁴⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009

⁴⁵ *Ibid*, h. 135

berdasarkan tingkat angka partisipasi siswa, dan berdasarkan rumus-rumus alokasi keuangan.⁴⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan, penatausahaan keuangan pendidikan adalah hal terpenting, penatausahaan keuangan pendidikan adalah merupakan kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena hal ini sangat berguna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengguna anggaran pendidikan.⁴⁷

Dalam hal penatausahaan anggaran pendidikan setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu : 1) pendataan dan pengklasifikasian data keuangan, 2) pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.

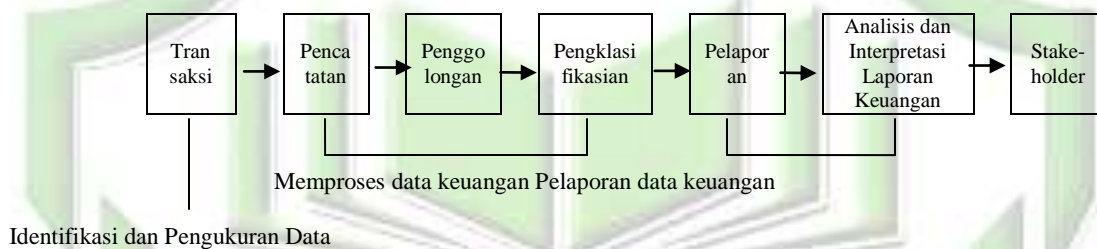
Dalam kegiatan ini meliputi identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan melakukan pelaporan keuangan kepada pihak pengguna. Untuk mengidentifikasi data keuangan dilakukan secara mendetil dan ditulis secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu didalam sebuah buku atau jurnal. Setiap pencatatan harus didukung oleh sejumlah faktur, kwitansi, dan nota yang sesuai dan disahkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan itu.

⁴⁶ Hariyanto Rangkuti “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” dalam https://www.kompasiana.com/har_rangkuti/54f67ce4a33311b07d8b4ddc/manajemen-pembiayaan-pendidikan, diakses pada 9 November 2018 pukul 21.27 WIB.

⁴⁷ ibid

Data keuangan pendidikan yang sudah dicatat, dikelompokkan dan diikhtisarkan harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait. Pelaporan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biasanya agar laporan keuangan berguna dalam proses pengambilan keputusan, maka laporan tersebut harus dianalisis dan diinterpretasikan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan pada angka lain. Jika proses ini digambarkan, maka akan tampak seperti berikut ini :

Gambar 2.1.
Proses Pendataan dan Pelaporan Keuangan Pendidikan⁴⁸



Kemudian hal kedua yang berkaitan dengan pembukuan pelaksanaan pendidikan harus dijalani dengan baik, setelah melakukan pendataan dan pelaporan keuangan. Kegiatan pembukuan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran berbagai macam transaksi – transaksi keuangan yang beredar. Selain berhubungan dengan pencatatan akuntansi juga bergelut dengan melakukan pemeriksaan, penyusunan

⁴⁸ Matin, *Manajemen Pembiayaan ...* h.138

laporan, penafsiran laporan dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan kegiatan penatausahaan keuangan suatu unit kerja.⁴⁹

Dari buku-buku yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan akuntansi ini adalah Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). Semua jenis pembukuan yang digunakan dalam hal akuntansi dimaksudkan untuk memiliki kemudahan membaca informasi yang dihasilkan dari kegiatan penatausahaan keuangan pendidikan. Maka dari itu seharusnya pencatatan keuangan pendidikan ini harus dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki keahlian dan kemampuan dibidang akuntansi.⁵⁰

Pembukuan setiap transaksi yang berpengaruh terhadap penerimaan dan pengeluaran uang wajib dicatat oleh bendaharawan dalam Buku Kas. Buku Kas bisa berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP). BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang. BKP merupakan buku harian yang digunakan untuk membantu pencatatan semua penerimaan dan pengeluaran uang menurut jenis sumber pembiayaan.⁵¹

c. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah sesuatu yang harus ada dalam manajemen pembiayaan, dan merupakan aktivitas yang terpenting, karena bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kemungkinan penyimpangan bisa saja terjadi. Secara umum pengawasan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan ...* h. 381.

bertujuan untuk mencocokkan apakah aktivitas yang dijalankan telah sesuai visi, misi, tujuan, program (perencanaan yang telah ditetapkan) dan dengan berbagai pedoman atau aturan - aturan yang sudah ditentukan.

Membahas tentang pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai konsep efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan rencana program pendidikan. Menurut pendapat Matin :⁵²

Efisiensi menunjuk kepada suatu rasio masukan dan keluaran yaitu suatu sistem dikatakan efisien jika sistem itu menghasilkan keluaran yang cukup atau bahkan lebih dari yang ditargetkan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Sementara efektivitas adalah menunjuk kepada suatu rasio antara keluaran yang diinginkan dengan keluaran yang dicapai.

Sejalan dengan pendapat Olynn Deniston dkk menjelaskan suatu pendekatan menyeluruh dan sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yaitu dengan mengurai empat pertanyaan penting yang berkaitan dengan kesesuaian, kecukupan, ketepatan pencapaian tujuan (keefektifan), dan tingkat penghematan penggunaan sumber daya (keefisienan).⁵³

Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran menurut Direktorat Tenaga Kependidikan dilakukan dengan maksud untuk mengetahui : 1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku; 2) kesesuaian hasil yang dicapai baik

⁵² Matin, *Manajemen Pembiayaan ...* h. 186.

⁵³ *Ibid.*

dibidang teknis administrative maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan; 3) kemanfaatan sarana yang ada (manusia, biaya, perlengkapan dan organisasi) secara efisien dan efektif; 4) sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna.

Tujuan pengawasan keuangan ialah untuk menjaga dan mendorong agar : 1) pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan. 2) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan, instruksi, serta asas-asas yang telah ditentukan. 3) kesulitan dan kelemahan bekerja dapat dicegah dan ditanggulangi atau setidaknya dapat dikurangi. Dan 4) pelaksanaan tugas berjalan efisien, efektif dan tepat pada waktunya.⁵⁴

Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan yang terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan adalah merupakan kegiatan yang bersifat sistemik dan sistematis. Dikatakan sistemik karena kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan dengan memilih atau memilah salah satu atau beberapa kegiatan saja dari kegiatan itu, akan tetapi harus mencakup empat kegiatan pokok tersebut yaitu memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan. Dikatakan sistematis, berarti bahwa kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan

⁵⁴*Ibid.*

harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari kegiatan memonitor, memeriksa dan menilai, sampai kepada kegiatan memberikan laporan penggunaan anggaran kepada pihak yang terkait guna menyiapkan pembuatan kebijakan lebih lanjut.

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sriprinya Ramakomud bahwa pengawasan adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai komponen proses pada sistem tersebut.⁵⁵

Pola sistem pengawasan yang dikemukakan Sriprinya Ramakomud dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Model Sistem Pengawasan⁵⁶



Pola sistem pengawasan yang digambarkan diatas menunjukkan bahwa objek (*performance*). Sementara yang menjadi tujuannya (*output-nya*) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijakan berikutnya. Untuk dapat mencapai tujuan ini diperlukan suatu proses kegiatan berupa memonitoring, evaluasi, dan pelaporan. Memonitoring adalah kegiatan pemantauan jalannya proses pelaksana rencana dan program berjalan. Evaluasi merupakan

⁵⁵Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan :Konsep dan Aplikasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2014. h.186-187.

⁵⁶*Ibid...*h.187.

tindakan memberi putusan (menilai) baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program berjalan. Sementara pelaporan adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program sebagai hasil dari kegiatan evaluasi.⁵⁷

Dalam Alqur'an surah Al An-am : 132 terkait dengan pengawasan Allah berfirman :

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

B. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal Nasional oleh Muhajirin dengan judul, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat*”, Tahun 2012. Fokus penelitian adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan dana dari masyarakat, sedangkan rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), proses penggalan dana dari masyarakat, proses pembelanjaan pembiayaan pendidikan, proses pengawasan pembiayaan pendidikan, dan proses pelaporan pembiayaan pendidikan. Tujuan penelitian untuk mengumpulkan informasi guna mendiskripsikan dan menganalisis tentang pengelolaan

⁵⁷*Ibid.*

pembiayaan pendidikan bersumber dari partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yaitu proses penyusunan RAPBS termasuk katagori partisipatif, proses penggalian dana dari orang tua siswa melalui komunikasi secara intensif dengan orang tua siswa. Sumber pembiayaan yang berasal dari orang tua siswa, Infaq pengembangan sekolah dan wakaf, sumbangan pengembangan pendidikan, uang POMG, uang komputer, uang kegiatan, uang ekstrakurikuler, dan uang ZIS. Simpulannya adalah proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) telah dilakukan secara partisipatif.⁵⁸

2. Tesis karya S. Yahya Saifudin dengan judul “Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Situs di MTs Ma’arif Sudimoro dan MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan), Tahun 2013.⁵⁹ Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan pembiayan di MTs Ma’arif Sudimoro dan di MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan? 2) Bagaimana pengorganisasian pembiayaan di MTs Ma’arif Sudimoro dan di MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan? 3) Bagaimana penggerakan pembiayaan di di MTs Ma’arif Sudimoro dan di MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten

⁵⁸ Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat*, dalam *Educational Management*, Vol.1, No.1, Juni 2012, diakses tanggal 18 Oktober 2018 pukul 07.30 dalam <http://journal.unnes.ac.ad.sju/index.php.eduman>.

⁵⁹ S. Yahya Saifudin, *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Situs di MTs Ma’arif Sudimoro dan MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan)*, Tesis tidak diterbitkan, Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013.

Pacitan? 4) Bagaimana pengawasan pembiayaan di MTs Ma'arif Sudimoro dan di MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan?. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi multi situs. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perencanaan pembiayaan madrasah dilaksanakan diawal tahun dengan melibatkan kepala madrasah, guru, komite madrasah serta pemangku kepentingan yang lain. Rencana pembiayaan madrasah selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk RAPBM (Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah). 2) Untuk mengorganisasikan bidang pembiayaan, madrasah membentuk sedikitnya dua orang bendahara. Satu bendahara yang menangani dana yang berasal dari pemerintah yang berbentuk dana BOS, dan satu bendahara lain bertugas mengelola keuangan yang berasal selain dana BOS. 3) Penggerakan pembiayaan dilakukan dengan lebih mengendalikan motivasi dari dalam diri (motivasi instrinsik). 4) Pengawasan yang dilakukan kepala madrasah terhadap keuangan madrasah lebih bersifat pengendalian. Artinya pengawasan yang dilakukan merupakan usaha untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

3. Jurnal Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, ditulis oleh Asfila, Murniati, Nasir Usman, Volume 3-4 Tahun

2015⁶⁰ Rumusan masalah : 1) Bagaimana Perencanaan Pembiayaan Pendidikan pada MTs Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ? 2) Bagaimana Teknik Pengalokasian Pembiayaan Pendidikan pada MTs Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ? 3) Bagaimana Pengawasan Pembiayaan Pendidikan pada MTs Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (4) Apa yang menjadi hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dalam pembiayaan pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan pembiayaan pendidikan pada MTsN Janarata dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan seluruh personil sekolah. (2) Teknik pengalokasian pembiayaan pendidikan berdasarkan kepada standar yang diprioritaskan untuk meningkatkan mutu pembelajaran (3) Pengawasan pembiayaan dilakukan secara intern dan ekstern, yaitu secara intern dilakukan oleh Kementerian Agama bidang keuangan dan secara ekstren oleh BPKP. (4) Hambatan yang dialami oleh kepala sekolah dalam pembiayaan pendidikan adalah tidak sesuai antara perencanaan dengan penggunaan pembiayaan pendidikan yang dialokasikan pemerintah. Benturan pendapat antara kepala sekolah dengan komponen sekolah tentang penggunaan anggaran madrasah. Implikasi dari penelitian ini

⁶⁰ Asfila, Murniati, Nasir Usman, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, volume 3, No.4, ISSN 2302.

adalah terbentuknya gaya manajemen konstruktif yaitu upaya mendorong setiap personil sekolah paham dan memahami tentang pembiayaan, terciptanya budaya transparansi tentang pengelolaan pembiayaan serta, terciptanya sikap rasa tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan pada MTsN Janarata.

4. Judul Tesis Manajemen Pembiayaan Lembaga Dalam Meningkatkan Eksistensi dan Daya Saing Sekolah (Studi Multi Kasus di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Panggung Tulungagung), Karya Hayik Shofi Nadya, Tahun 2016.⁶¹ Rumusan masalah sebagai berikut :
- 1) Bagaimana perencanaan pembiayaan dalam meningkatkan eksistensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung ?
 - 2) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dalam meningkatkan eksistensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung ?
 - 3) Bagaimana evaluasi pembiayaan dalam meningkatkan eksistensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung ?
 - 4) Bagaimana implikasi manajemen pembiayaan terhadap eksistensi dan daya saing sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al

⁶¹ Hayik Shofi Nadya, *Manajemen Pembiayaan Lembaga Dalam Meningkatkan Eksistensi dan Daya Saing Sekolah (Studi Multi Kasus di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung)*, Tesis tidak diterbitkan, Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2016.

Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi multi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah:1) perencanaan pembiayaan. Terdapat kesamaan antara SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung. Keduanya berpedoman pada petunjuk teknis BOS. Dalam penetapan sasaran dan tujuan pembiayaan, keduanya mengacu pada delapan standar pendidikan nasional. Perbedaan dari keduanya terletak pada pelaksanaan perencanaan, di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dilaksanakan satu tahun sekali yaitu pada awal tahun ajaran baru, sedangkan di MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung dilaksanakan satu tahun dua kali pada setiap awal semester. Perencanaan dalam rangka meningkatkan eksistensi dan daya saing sekolah pada kedua sekolah ini terdapat perbedaan, yaitu terletak pada skala prioritas pembiayaannya. Di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut skala prioritas terletak pada pengembangan kompetensi lulusan secara umum dan pengembangan sarana dan prasarana sekolah, sedangkan di MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung priortasnya pada program kesiswaan yaitu terletak pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 2) pelaksanaan pembiayaan. Secara keseluruhan terdapat kesamaan dalam pelaksanaan pembiayaan SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung. Pembukuan dilakukan bendahara dengan menggunakan kelengkapan administrasi keuangan berupa buku kas umum, buku pembantu

kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Perbedaan keduanya terlihat pada penyaluran biaya, di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut penyaluran biaya dilakukan langsung oleh bendahara berdasarkan adanya bukti nota atau kwitansi sedangkan di MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung dilakukan bendahara berdasarkan proposal yang diajukan. 3) evaluasi pembiayaan. SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung melakukan evaluasi pembiayaan dengan adanya pengawasan atau monitoring dari pihak intern dan ekstern. Untuk pelaporan dilakukan oleh sekolah kepada pihak-pihak terkait seperti kepada yayasan dan komite, dinas pendidikan, dan badan pemeriksaan keuangan seperti BPK dan BPKP. Perbedaannya terletak pada pelaporan yang dilakukan, yaitu kepada dinas pendidikan dan yang satu kepada departemen agama. 4) implikasi manajemen pembiayaan terhadap eksistensi dan daya saing sekolah. Implikasi yang diberikan dengan adanya manajemen pembiayaan pada keduanya adalah meningkatnya eksistensi dan daya saing sekolah. Persamaan antara keduanya adalah dengan pembiayaan dapat meningkatkan keunggulan dan prestasi sekolah yang berpengaruh pada eksistensi dan daya saing sekolah. Perbedaannya terletak pada keunggulan yang ditonjolkan. Di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut pada keagamaan dan ekstrakurikuler serta sarana dan prasarana yang lengkap sedangkan di MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung pada ekstrakurikuler.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1.	Muhajirin, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat, Tahun 2012 (Jurnal Nasional, Universitas Negeri Semarang: Educational Management 1)	Membahas Tentang pengelolaan pembiayaan	Fokus pada pembiayaan yang bersumber dari masyarakat	Fokus pada pembiayaan yang bersumber dari dana BOS
2.	S. Yahya Saifudin, Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Situs di MTs Ma.,arif Sudimoro dan MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan), 2013	Membahas tentang manajemen pembiayaan, menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang sama	Lokasi penelitian, fokus penelitian dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam, pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajek an pengamatan, pemeriksaan sejawat dan triangulasi	Focus Penelitian pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, lokasi penelitian MTs Hidayatullah Kec.Kahayan Kuala.
3.	Asfila, Murniati, Nasir Usman, Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Bener Meriah, Volume 3-4 Tahun 2015	Membahas tentang pengelolaan manajemen pembiayaan pendidikan , menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan dan data yang sama	Focus penelitian terdapat hambatan pembiayaan pendidikan	Focus pada Penelitian pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, lokasi penelitian MTs Hidayatullah Kec.Kahayan Kuala

4.	Hayik Shofi Nadya, Manajemen Pembiayaan Lembaga dalam Meningkatkan Eksistensi dan Daya Saing Sekolah (Studi Multi Kasus di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung) Tahun 2016.	Membahas Tentang Manajemen Pembiayaan, menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang sama	Lokasi Penelitian, focus penelitian yaitu dalam meningkatkan daya saing sekolah	Focus penelitian pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
----	---	--	---	--



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang terletak di jalan Hidayatullah No. 135 Desa Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan nama yayasan Hidayatullah Bahaur yang didirikan sejak tahun 1983 dengan status madrasah terakreditasi “Baik” Nomor sertifikat Akreditasi 018189, Tanggal 30 September 2013, Akta Notaris Nomor 43 Tanggal 14 Mei 2012, dengan luas tanah 11.625 m² Dengan status tanah hibah dari Pemda, SK Kelembagaan nomor Kd.21.08/3/PP.00/1583/2013 10 Juli 2013 tanggal, NSM dari Kementerian Agama dengan nomor 1212621100006.

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan, dimulai dari pembuatan proposal penelitian, seminar proposal, penelitian lapangan hingga pelaporan (ujian tesis), dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
		Bulan
1	Penyusunan Proposal	Desember 2018
2	Seminar Proposal	Januari 2019
3	Menyusun Instrumen Penggali Data	Februari 2019
4	Menggali, Mengolah, Menganalisa Data	Maret 2019
5	Menyusun Laporan Hasil Penelitian	April 2019
6	Ujian Tesis	

B. Prosedur Penelitian

Menurut Moleong dalam penelitian kualitatif terdiri dari tahap pralaksanaan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa data, dan tahap pelaporan hasil penelitian.⁶² Pada Tahap pralaksanaan, peneliti melakukan persiapan yang terkait dengan kegiatan penelitian, yaitu menyusun rancangan rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat ijin penelitian, menjajaki serta menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan kelengkapan penelitian, dan bagaimana peneliti beretika dalam melakukan penelitian.

Apabila tahapan pralaksanaan sudah berhasil/selesai dilaksanakan oleh peneliti, selanjutnya peneliti melangkah ke tahap berikutnya sampai kepada tahap pelaporan hasil penelitian yaitu tentang Manajemen Pembiayaan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶³ Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber pertama

⁶² Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h. 127-148.

⁶³ Rulam Ahmadi, *Memahami Metodologi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, h.3.

dimana data dihasilkan. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁶⁴

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan lisan (*verbal*) dan perilaku dari subjek (*informan*) yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yang akan diamati oleh peneliti adalah Kepala Madrasah dan Bendahara, sedangkan yang menjadi informan yaitu komite sekolah, Kasi Pendis Kankemenag Kabupaten Pulang Pisau, Wakil Kepala Madrasah, Tata Usaha dan Guru Senior.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder yaitu berupa profil madrasah, dokumen keuangan madrasah, foto – foto kegiatan madrasah, dll.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

1. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi ke madrasah yang menjadi tempat penelitian. Data observasi ini dianggap sangat penting karena akan menguatkan data wawancara dan dokumentasi. Teknik Observasi digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang mungkin belum menyeluruh atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan melenceng. Dalam observasi peneliti menggunakan *field notes* atau catatan kecil dan alat untuk merekam beberapa tindakan atau aktivitas yang relevan dengan rumusan masalah. Adapun yang di observasi oleh peneliti adalah :

- a) Mengamati infrastruktur madrasah
- b) Mengamati kelengkapan sarana dan prasarana madrasah
- c) Melakukan pengamatan pada saat rapat di madrasah dalam rangka mengamati /mengetahui kegiatan yang dilakukan kepala sekolah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada guru dan karyawan terkait kebijakan dalam bidang pembiayaan/keuangan madrasah.
- d) Melakukan pengamatan terhadap rancangan RAKM/RAPBS, pelaksanaannya, pertanggungjawaban sampai kepada pengendalian keuangan di madrasah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara sering disebut juga dengan *Interview* atau kuesioner lisan. Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dua pihak, dimana yang satu sebagai pewawancara (*Interviewer*) dengan maksud dan tujuan tertentu.⁶⁵ Teknik ini memiliki arti segala kegiatan untuk menghimpun (mencari) data dan informasi dengan melakukan tanya jawab dengan lisan secara bertatap muka (*face to face*) atau menggunakan media elektronik dengan nara sumber yang bersangkutan.⁶⁶

Metode wawancara ini dipakai untuk mengumpulkan data dari para informan, melalui wawancara langsung dengan subyek utama dan para informan, yaitu yang berkaitan dengan :

- a. Sumber Pendanaan Sekolah
- b. Proses perencanaan (Penyusunan RAPMB dan RAKM)
- c. Pelaksanaan/realisasi RAPBM dan RAKMP
- d. Koordinasi yang dilakukan manajer dengan para pelaksana
- e. Penugasan/penunjukan yang dilakukan oleh manajer
- f. Pelaksanaan pengawasan keuangan di madrasah dan siapa saja yang berwenang melakukan pengawasan.
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah serta hal – hal lain yang berhubungan dengan focus masalah penelitian.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, h.91.

⁶⁶ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998, h. 74.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Jadi, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan lain sebagainya.⁶⁷ Adapun dokumen yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Profil Madrasah
- b. Surat Keputusan
- c. Data Guru/karyawan dan data siswa
- d. Dokumen terkait dengan keuangan seperti RAPBM/S, pembukuan keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan, pengawasan keuangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka untuk menganalisis data tersebut Analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada langkah-langkah

⁶⁷Amirul Hadi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 110.

analisis data yang dikemukakan Miles dan Hubberman.⁶⁸ Mereka menyatakan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data atau Data *Collection*

Pengumpulan data adalah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian yang terkait dengan rumusan masalah yang dikemukakan.

2. Pengurangan Data atau Data *Reduction*

Reduksi data dalam penelitian mencakup kegiatan memilih dan memilah data kedalam konsep-konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu sesuai bahasan. Pada reduksi data, data yang begitu banyak dan kompleks serta bercampur aduk diseleksi, digolongkan, diarahkan, dibuang yang tidak relevan dan diorganisasikan dengan cara sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Penyajian Data atau Data *Display*

Penyajian data berwujud sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan bagian dari analisis dengan maksud agar data atau informasi yang telah terkumpul dapat tersusun dengan baik, menyederhanakan kekomplekan data agar menjadi lebih mudah dipahami.

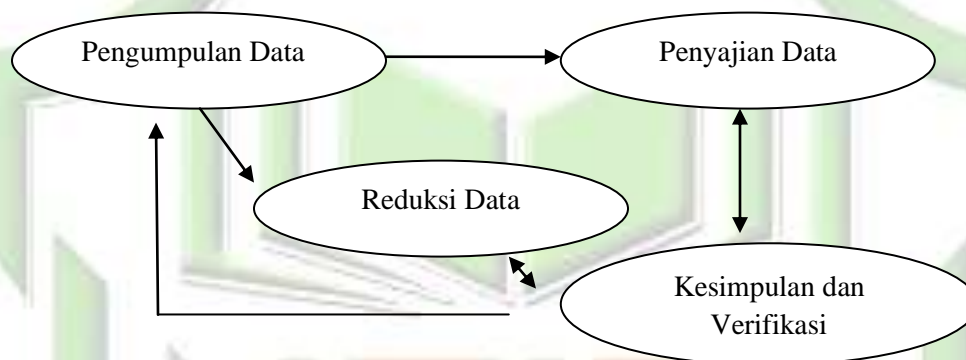
⁶⁸Mathew B, Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. TjetjepRohenaRohidi, Jakarta: UI Press, 1992, h. 16-18.

4. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi atau *Conclusion* dan *Verifying*

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah berdasarkan data relevan yang dikumpulkan dan ditampilkan tersebut, kemudian ditarik satu kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir penelitian.

Teknik analisis data sebagaimana yang dikemukakan di atas dapat dilihat pada skema sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Model Analisis Data Interaktif dari Miles dan Huberman⁶⁹



Analisis data model interaktif yang peneliti gunakan sebenarnya merupakan analisis induktif. Analisis induktif adalah cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian fakta-fakta tersebut diambil kesimpulan secara umum.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif kegiatan pengujian keabsahan data merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Pelaksanaan pengujian keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu :

⁶⁹*Ibid*,...h. 23

1. Keterpercayaan (*kredibility*)

Peneliti merupakan instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, sehingga sangat mungkin dalam pelaksanaan penelitian di lapangan terjadi kecondongan (bias). Agar data yang diperoleh dapat terhindar dari hal tersebut, maka perlu diuji derajat keterpercayaannya. Uji kredibilitas data terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data).

2. Transfereabilitas

Transfereabilitas atau keteralian dalam penelitian kualitatif dapat dicapai karena adanya kesamaan antara konteks pemberi informasi dengan penerima. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk melakukan pengalihan tersebut peneliti menyediakan data deskriptif secukupnya dalam membuat kesimpulan suatu penemuan. Oleh karena itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas dan sistematis, dan dapat dipercaya. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu penelitian dapat

diberlakukan (Transferability), maka laporan tersebut memenuhi standart transferabilitas.

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau kebergantungan dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam konseptualisasi rencana penelitian , pengumpulan data , interpretasi penemuan, dan pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Suatu penelitian yang reliabel apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada , maka penelitian tersebut tidak reliabel.⁷⁰

4. Konfirmabilitas/objektifitas

Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh objektif atau tidak, kesahihan data yang diperoleh secara objektif tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan temuan seseorang. Jika data tersebut telah disepakati oleh beberapa atau banyak orang maka dapat dikatakan objektif, namun penekanannya pada datanya. Dalam penelitian kualitatif uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil

⁷⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 131

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

5. Triangulasi

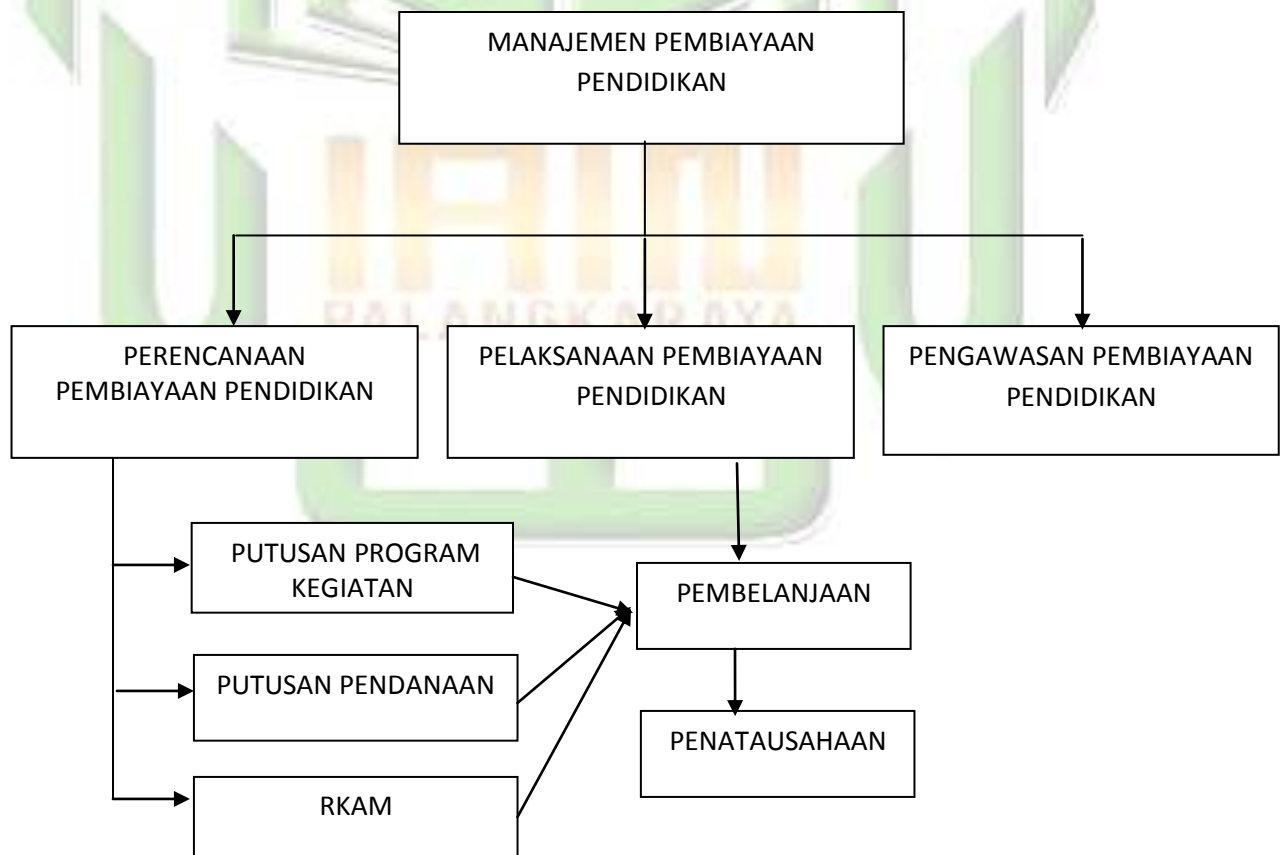
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, teknik triangulasi yang paling banyak digunakanialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh dari beberapa sumber.⁷¹ Triangulasi dalam penelitian ini, digunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pelaksanaannya dengan melakukan pengecekan data hasil wawancara kepala madrasah, komite, guru senior, kepala tata usaha, dan bendahara madrasah. Lebih lanjut menurut Creswell, triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.⁷² Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, .membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang

⁷¹Trianto, *Pengantar Penelitian bagipengembangan ProfesiPendidikdanTenaga kependidikan*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 294.

⁷²Creswell. Jonh W ,*Op.Cit*,h. 330.

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang berada atau pemerintah, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan, dikelompokkan, berdasarkan pandangan yang sama, berbeda dan spesifik dari beberapa sumber tersebut. Data di analisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang akurat.

G. Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL PENELITIAN

B. Gambaran Umum MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah lembaga pendidikan Islam dan merupakan salah satu madrasah swasta yang terdapat di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Yang bergerak dalam dunia pendidikan untuk memajukan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat, madrasah ini sudah terakreditasi B dengan nomor sertifikat 029865 Tahun 2018. Madrasah ini terletak di Jalan Hidayatullah No. 135 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, email mts.hidayatullah.bahaur201@gmail.com. NPSN : 69755526, NSM : 1212621100006. Madrasah ini berada dibawah Yayasan Hidayatullah Bahaur.

1. Sejarah Singkat MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau berdiri pada Tahun 1983 di Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Di bawah naungan Yayasan Hidayatullah Bahaur, madrasah ini didirikan oleh H. Muhammad Nakhrawi H.A, Syahrani Haderi, dan H. Muhammad, atas

dorongan masyarakat agar di Kecamatan Kahayan Kuala terdapat sebuah Madrasah Tsanawiyah, dengan SK Ijin Pendirian Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor MTs.P.3/33/1986, Tanggal 4 September 1986. Pada Tahun 1983 merupakan tahun rintisan dengan jumlah tenaga pengajar 5 Orang, dan yang menjadi kepala madrasah pertama adalah Bapak Syarkawi, AA. Pasang surut selama madrasah ini berdiri telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan/Kepala Madrasah, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Nama-Nama Kepala Madrasah
yang pernah menjadi Kepala Madrasah di MTs Hidayatullah
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau⁷³

No	Nama	Periode
1	2	3
1	Syarkawi, AA	Tahun 1983 sd 1987
2	H.M. Nakhrawi HA	Tahun 1987 sd 1991
3	M. Aliani	Tahun 1991 sd 1995
4	Dra. Sakinah Sungkar	Tahun 1995 sd 2000
5	Hurni Rutami, S.Ag	Tahun 2000 sd 2004

⁷³Sejarah Berdirinya MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau

1	2	3
6	Abrar, S.Pd.I	Tahun 2004 sd 2009
7	Abdurrahman	Tahun 2009 sd 2011
8	Tambrani, S.Pd.I	Tahun 2011 sd 2014
9	Masriana, S.Ag	Tahun 2014 sd Sekarang

Pada awal berdirinya madrasah ini dan dalam perkembangannya simpati masyarakat di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau umumnya sangat kurang, dan jumlah siswa yang masuk ke madrasah ini sangat sedikit karena letak madrasah yang kurang strategis dan jauh dari perumahan penduduk. Akhirnya pada tahun 1998 atas inisiatif pengurus yayasan dan dukungan berbagai pihak maka yayasan Hidayatullah pindah ke lokasi baru yaitu ditempat saat ini MTs Hidayatullah berdiri di Kelurahan Bahaur Basantan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Sampai dengan saat ini jumlah guru sudah berjumlah 22 dan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2018/2019 berjumlah 247 siswa.

2. Profil MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Dibawah ini adalah profil MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sebagai berikut :

Tabel 4.2
Profil MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau⁷⁴

Nama Madrasah	:	MTs Hidayatullah
Nomor Statistik Madrasah	:	121.2.6211.0006
Ijin Operasional Madrasah	:	MTs.P.3/1986
NPSN	:	69755526
Akreditasi	:	B
Provinsi	:	Kalimantan Tengah
Kabupaten	:	Pulang Pisau
Kecamatan	:	Kahayan Kuala
Desa	:	Bahaur Basantan
Kode Pos	:	74872
Tahun Berdiri	:	1983
Bangunan Madrasah	:	Semi Permanen

3. Visi Misi Madrasah

- a. Adapun yang menjadi Visi MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau adalah “Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia, Cerdas Terampil dan menguasai IPTEK.”

⁷⁴Profil MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau, 2019

b. Misi madrasah adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pengamalan ajaran Islam.
2. Menumbuhkembangkan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan madrasah
3. Mengoptimalkan potensi akademik melalui proses pembelajaran dan bimbingan
4. Membekali peserta didik dengan IPTEK dan Wawasan global

4. Tujuan Umum Madrasah

Adapun yang menjadi tujuan umum MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau pada tahun 2016/2017 – 2020/2021 adalah :

- 1) Menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan
- 2) Hafal dan fasih bacaan salat dan keserasian/kesempurnaan bacaan
- 3) Hafal dan fasih doa-doa harian dan doa selesai sholat
- 4) Terbiasa membaca Yasin, Al Waqiah, asmaul husna, sholawat dan tahlil
- 5) Terbiasa menjalankan sholat dhuha
- 6) Terbiasa memberikan infaq dan shodaqoh
- 7) Mampu mengelola dan sekaligus sebagai petugas dalam kegiatan keagamaan di madrasah dan masyarakat
- 8) Mampu menghargai keberagaman budaya, suku, ras, dan tingkat social ekonomi.

- 9) Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua mata pelajaran.
- 10) Datang dan pulang tepat waktu
- 11) Unggul dalam perolehan nilai ujian, persaingan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, unggul dalam olimpiade sains dan kompetisi sains, kreatifitas seni dan olahraga.

5. Data Statistik Siswa, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Struktur Organisasi Madrasah

a. Data Statistik Siswa MTs Hidayatullah

Adapun keadaan siswa MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Tahun Pelajaran 2018/2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Keadaan Siswa MTs Hidayatullah
T.A 2018/2019⁷⁵

No	Kelas	Keadaan Siswa Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019		Jumlah
		Lk	Pr	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	VII	42	38	80
2	VIII	34	33	67
3	IX	72	28	100
		148	99	247

⁷⁵Laporan Bulanan MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Tahun 2019

b. Data Statistik Guru dan Tenaga Kependidikan

Berikut ini data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan di MTs

Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau :

Tabel 4.4
Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MTs Hidayatullah T.A 2018/2019⁷⁶

No	Status Pegawai	Jumlah	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Guru PNS diperbantukan	2	S1	Sudah Sertifikasi
2	GTY	12	S1	6 Sudah sertifikasi
3	GTT	4	S1	-
4	Pegawai TU Tetap Yayasan	3	2 S1, 1 SMA	-
5	Penjaga Sekolah	1	SMA	-
Jumlah		22		

c. Struktur Organisasi MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Kepala Madrasah	: Masriana, S.Ag
Wakamad Kurikulum	: Risnawati, S.Pd
Wakamad Kesiswaan	: Dra. Rusmiati
Wakamad Sarpras	: Abrar, S.Pd.I
Kepala Tata Usaha	: Harunur Rasyid, S.Pd.I
Bendahara	: Seniarti, S.Pd.I

⁷⁶*Ibid...*

6. Data Sarana Prasarana Madrasah

a. Tanah dan Bangunan Madrasah

Status tanah sepenuhnya adalah milik Yayasan Hidayatullah Bahaur, dengan luas tanah seluruhnya 11.625 m², luas bangunan 864 m².

b. Sarana dan Prasarana Madrasah

Tabel 4.5
Keadaan Sarana Prasarana MTs Hidayatullah
T.A 2018/2019⁷⁷

Uraian	Jumlah	Kondisi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Ruang Kepala Madrasah	1	Baik
Ruang Tata Usaha	1	Baik
Ruang Guru	1	Rusak Ringan
Ruang Kelas	8	6 Ruang cukup baik, 2 ruang rusak ringan
Ruang Perpustakaan	1	Baik
Ruang Lab. IPA	1	Baik
Ruang Lab. Komputer	-	-
Aula Serba Guna	1	Baik
Masjid komplek madrasah	1	Baik
Ruang Kesenian	1	Baik
Ruang BP/BK	-	-
Ruang Osis	-	-
Toilet	4	Baik

⁷⁷Ibid...

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Proyektor LCD	2	Baik
Monitor LCD	2	Baik
Laptop	3	Baik
Kumputer	2	Baik
Printer	4	3 Baik, 1 rusak
Spiker Aktif	2	Baik
Bahan Ajar Multimedia	8	Baik
Ware less	1	Baik

Keadaan Bangunan Madrasah hampir keseluruhan terbuat dari kayu (semi permanen), dengan kondisi ruang secara umum Baik, bangunan ruang Guru dan beberapa ruang kelas masih kurang memadai dan perlu rehab total.

7. Srtuktur Kurikulum

Dalam pelaksanaannya MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau mengalami beberapa kali perubahan Kurikulum :

- a. Pemberlakuan Kurikulum 1994, dilaksanakan sampai dengan tahun 2004
- b. Kurikulum 2004, dilaksanakan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
- c. Kurikulum 2006 (KTSP), diberlakukan mulai tahun 2007 sampai dengan 2016

d. Kurikulum 2013 (K13), diberlakukan mulai tahun 2017 sd sekarang

Tabel 4.6

**Struktur Kurikulum 2013 (K-13) MTs Hidayatullah Kec. Kahayan
Kuala Kab. Pulang Pisau⁷⁸**

No	Komponen	VII	VIII	IX
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Kelompok A	2	2	2
1	Al Qur'an Hadist	2	2	2
2	Fikih	2	2	2
3	Akidah Akhlak	2	2	2
5	Bahasa Arab	3	3	3
6	Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
7	Bahasa Indonesia	6	6	6
8	Matematika	5	5	5
9	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
10	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
11	Bahasa Inggris	4	4	4
	Kelompok B			
12	Seni Budaya (termasuk Mulok)	3	3	3
13	Pend. Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	3	3	3
14	Prakarya	3	3	3
Jumlah		46	46	46

⁷⁸Struktur Kurikulum MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Tahun 2019

8. Prestasi Akademik dan Non Akademik

Adapun prestasi akademik dan non akademik yang diraih oleh siswa/siswi MTs Hidayatullah adalah sebagai berikut :

1. Juara 1 Bidang IPA Tk MTs Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Tk Kabupaten Pulang Pisau
2. Lomba Pidato, Juara 1 Pidato Tingkat Kabupaten Pulang Pisau
3. Lomba Seni Hadrah, Juara 1 Tingkat Kabupaten Pulang Pisau
5. Lomba Tari Daerah, Juara III Tari Dayak Tk Kabupaten Pulang Pisau
6. Lomba Pencak Silat, Juara I Pencak Silat se Kecamatan Kahayan Kuala
7. Juara II cabang Bulu Tangkis Tk MTs pada Kegiatan AKSIOMA Tk. Kabupaten Pulang Pisau
8. Juara III Futsal Tk. MTs pada kegiatan lomba futtsal dalam rangka memperingati HAB Kementerian Agama⁷⁹

9. Keuangan dan Pembiayaan Madrasah

Pendanaan dan pembiayaan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau seluruhnya bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau melalui Seksi Pendidikan Islam. Pencairan dana BOS dilakukan dalam dua tahap

⁷⁹ Laporan Prestasi Siswa MTs Hidayatullah Tahun 2019

(setiap semester) berdasarkan pengajuan RAKM dari madrasah, yaitu tahap pertama (Januari – Juni) paling lambat dicairkan pada awal maret, dan tahap kedua (Juli – Desember) dicairkan pada bulan Agustus tahun berjalan.

Besar biaya yang diterima oleh madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan alokasi dana persiswa pertahun untuk tingkat MTs sebesar Rp. 1.000.000,-.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana BOS yang diterima oleh madrasah diberikan secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan dewan guru dan komite madrasah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan (otonomi), dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Dibawah ini gambaran Dana BOS yang diterima dan dikelola oleh MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dari tahun 2018 :

Tabel 4.7

**Data Dana BOS yang diterima MTs Hidayatullah Kec. Kahayan
Kuala Kab. Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018⁸⁰**

Tahun Anggaran	Tahap I (Januari-Juni)	Tahap II (Juli-Desember)	Jumlah Dana BOS diterima pertahun
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2018	116.500.000,-	123.500.000,-	240.000.000,-

⁸⁰ Data BOS MTs Hidayatullah Tahun 2018

10. Struktur Pengelola Keuangan MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Berikut gambaran struktur pengelola keuangan/pembiayaan MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Gambar 4.1

Struktur Pengelola Keuangan MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau⁸¹



⁸¹Struktur Pengelola Keuangan MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau

C. Penyajian Data Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian maka pada bagian ini akan diuraikan tentang pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah sesuai dengan kondisi riil dilapangan.

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Perencanaan adalah suatu proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah – langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi segala kebutuhan organisasi, perencanaan menentukan untuk apa, dimana, kapan dan berapa lama akan dilaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Sebagaimana menurut Utari bahwa proses penyusunan perencanaan kegiatan anggaran sekolah dengan langkah – langkah sebagai berikut : a) Menginventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya, b) Inventarisasi sumber pembiayaan, c) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

- a. Inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang berdasarkan kegiatan pada tahun sebelumnya.

Sebelum menyusun perencanaan anggaran madrasah, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam menyusun perencanaan anggaran sekolah/madrasah. Yang pertama adalah menginventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau gambaran yang tepat mengenai kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh sekolah ditahun mendatang dengan merujuk kepada kegiatan pada tahun sebelumnya.

Berikut ini paparan kepala madrasah Ibu MR berkaitan dengan inventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan. Beliau menyampaikan bahwa : “ Setiap awal tahun ajaran baru kami mengadakan pertemuan bersama-sama dengan wakil kepala madrasah, bendahara, komite madrasah, Kepala Tata Usaha dan guru untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan beserta menetapkan anggaran pendapatan dan pengeluaran. Jadi program apa saja yang akan dibiayai. Dan dalam rapat ini juga kami membahas evaluasi terhadap pelaksanaan program pada tahun sebelumnya. Yang akan dijadikan tolak ukur untuk pelaksanaan program ditahun mendatang.”⁸²

⁸²Wawancara dengan Masriana, S.Ag, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

Senada dengan apa yang disampaikan oleh kepala madrasah, Ibu SN selaku bendahara madrasah mengemukakan : “Dalam pertemuan tersebut mula-mula kita membuat konsep program apa saja yang akan kita laksanakan dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Tiap masing-masing wakamad menyampaikan program kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti honor pendidik dan tenaga kependidikan, kegiatan eskul, kegiatan pembelajaran, pengadaan ATK, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana madrasah dll. Dengan merujuk kepada pelaksanaan program ditahun sebelumnya, dan selanjutnya akan dibahas bersama-sama program apa yang menjadi prioritas dan mendesak yang harus dilaksanakan.”⁸³

Masih berkenaan dengan inventarisasi program kegiatan, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan Ibu RM menjelaskan : “ Untuk penyusunan perencanaan keuangan madrasah, biasanya dilaksanakan pada awal tahun ajaran, sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru, dimana sebelum dilaksanakan rapat, kami disurati oleh kepala madrasah untuk menyusun program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan ditahun mendatang, hal tersebut kami susun terlebih dahulu dan akan disampaikan pada saat pertemuan. Saya sebagai wakamad kesiswaan maka program yang saya susun tidak jauh beda dengan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan PPDB dll. Semua

⁸³ Wawancara dengan Ibu Seniarti, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019.

peserta rapat yang hadir menyampaikan usulan program masing – masing, yang nantinya akan dibahas bersama apakah kegiatan tersebut perlu dilaksanakan atau tidak menyesuaikan dana yang tersedia.⁸⁴

Untuk memperkuat data diatas, peneliti juga mewawancarai ketua komite madrasah Bapak AH, beliau menyatakan bahwa : “Setahu saya perencanaan keuangan di madrasah ini selalu diadakan rapat dan saya selalu diundang, biasanya rapat dilaksanakan pada awal tahun pelajaran,. Saya mewakili orang tua siswa ikut membahas dan merumuskan apa saja yang menjadi kebutuhan madrasah seperti menentukan kegiatan dan program apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Dalam merumuskan program kegiatan ini tidak semua warga sekolah diundang hanya beberapa orang saja seperti kepala madrasah, wakamad, bendahara, kepala TU, beberapa orang guru dan kadang – kadang pihak yayasan juga datang.⁸⁵

Dari pemaparan empat orang sumber diatas dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan keuangan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan pertemuan atau rapat, sebelum rapat dilaksanakan kepala sekolah melakukan fungsi koordinasi bersama dengan seluruh pengurus madrasah seperti wakil-wakil kepala madrasah, komite, bendahara, tata usaha dan guru – guru

⁸⁴Wawancara dengan Ibu Rusmiati, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Hadi, S.Pd.I, Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 26 Januari 2019.

senior dengan terlebih dahulu mengirim surat agar menyusun program dan rencana kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan, dan disampaikan nanti pada saat pelaksanaan rapat. Dalam rapat tersebut akan dirumuskan bersama-sama program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Hasil musyawarah tersebut nantinya akan dituangkan kedalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RAKM) yang menguraikan biaya masing-masing program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran menyesuaikan dana yang tersedia, mengingat sumber pendapatan yang ada di MTs Hidayatullah dari tahun ketahun tidak sama.

Disamping itu, selain membuat perencanaan untuk satu tahun kedepan pada rapat tersebut juga dilaksanakan evaluasi program ditahun sebelumnya, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja yang dialami oleh madrasah, hal-hal yang baik dipertahankan dan kendala yang dihadapi dicarikan jalan keluar agar pelaksanaan ditahun mendatang menjadi lebih baik khususnya yang terkait dengan pelaksanaan anggaran dan keuangan madrasah.

b. Inventarisasi Sumber Pembiayaan

Langkah penyusunan perencanaan keuangan yang dilakukan di MTs Hidayatullah selanjutnya adalah menginventarisasi sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang sudah dirumuskan untuk jangka waktu satu tahun kedepan. Berikut ini hasil

wawancara yang dilakukan dengan kepala madrasah Ibu MR, beliau menjelaskan bahwa : “ Sumber pembiayaan di madrasah ini berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat yang diberikan Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, dana inilah yang membiayai seluruh pelaksanaan program kegiatan di MTs Hidayatullah ini. Kami tidak memungut iuran apapun dari siswa ataupun orang tua siswa. Kami melaksanakan sekolah gratis, dan menggunakan dana BOS ini seefektif mungkin, agar semua program kegiatan di madrasah ini dapat berjalan. Salah satu strategi yang kami lakukan adalah dengan menyusun kegiatan yang menjadi prioritas dan dianggap penting serta mendukung pelaksanaan PBM yang harus dilaksanakan.”⁸⁶

Hal senada diperkuat pernyataan yang disampaikan oleh bendahara Ibu SN yang menyatakan “ Semua pelaksanaan kegiatan operasional di MTs Hidayatullah ini bersumber dari dana BOS dari Kemenag, karena dana yang digunakan hanya terbatas dari dana BOS maka kami berusaha mengelola dana ini dengan hemat. Besaran dana BOS yang diterima adalah 1.000.000/per siswa pertahun, dikalikan dengan jumlah siswa. Dana BOS ini disalurkan oleh Kemenag dua kali setahun yaitu setiap semester.”⁸⁷

⁸⁶ Wawancara dengan ibu Masriana, S.Ag, di Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

⁸⁷ Wawancara dengan ibu Seniarti, S.Pd.I, di Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala tata usaha MTs Hidayatullah Bapak HR, yang menjelaskan “Karena dana dimadrasah ini terbatas yaitu hanya mengandalkan dana BOS, maka dalam menyusun perencanaan kami harus menyesuaikan dana yang tersedia dan menyesuaikan item-item kegiatan yang tercantum dalam juknis BOS yang dikeluarkan oleh Kemenag. Besar anggaran yang direncanakan tahun 2018 adalah Rp. 247.000.000,- dengan harapan dana tersebut dapat memenuhi seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.”⁸⁸

Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh keempat sumber diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber dana yang digunakan oleh MTs Hidayatullah berasal dari dana pemerintah yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau. Madrasah tidak memungut iuran/dana yang bersumber dari siswa/orang tua siswa maupun dana dari masyarakat.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)

Prosedur terakhir dari kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan adalah penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) atau dilingkungan madrasah lebih dikenal dengan RKAM (Rencana Kegiatan

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Harunur Rasyid, S.Pd.I, di Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 7 Februari 2019

Anggaran Madrasah). Tujuan dari penyusunan RKAS/RKAM adalah memudahkan sekolah/madrasah untuk mengetahui secara rinci tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan supaya tujuan dan kewajiban sekolah dapat tercapai. Dari sisi partisipasi, RKAS/RKAM memberikan dukungan terhadap diperhitungkannya harapan-harapan para pemangku kepentingan sekolah baik eksternal maupun internal, tanpa mengabaikan kondisi nyata sekolah.

Berikut ini penuturan kepala madrasah terkait dengan penyusunan RAKM di MTs Hidayatullah “Karena dana yang dikelola oleh MTs Hidayatullah adalah berasal dari dana BOS maka dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) berdasarkan aturan atau juknis BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, berdasarkan juknis BOS Kemenag komponen - komponen kegiatan yang boleh dibiayai adalah terdiri dari : komponen – komponen penganggaran pengembangan perpustakaan, kegiatan PPDB/Matsama, kegiatan PBM dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan/ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, pemeliharaan/pengadaan sarana parasana, honorarium tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesi, dan pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran.”⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan ibu Masriana, S.Ag, di Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 16 Januari 2019.

Selanjutnya berikut adalah keterangan dari wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, yang menjelaskan : “Penyusunan RKAM dibuat dalam kurun waktu setahun sekali yaitu pada awal tahun pelajaran, namun pada semester kedua perlu dilakukan revisi karena dana yang diterima terkadang tidak sama, maka kami membuat RKAM yang dirinci persemester yaitu semester I (Juli sd Desember) dan semester II (Januari – Juni). Formulir RKAM yang disusun berdasarkan formulir yang ada dalam juknis BOS. Setelah RKAM tersusun dan disampaikan kepada seluruh warga sekolah dan setelah disetujui, maka RKAM ditandatangani oleh bendahara, disahkan oleh Kepala Sekolah dan ketua komite.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam kegiatan penyusunan RKAM di MTs Hidayatullah dibuat dalam kurun waktu satu tahun yaitu disusun pada awal tahun ajaran baru, kepala madrasah dalam penyusunan RKAM bersama dengan tim pengelola keuangan yang terdiri dari Wakamad, Bendahara, Guru senior dan komite madrasah, RKAM disusun berdasarkan Juknis BOS yang dikeluarkan oleh Kemenag, karena pendanaan pembiayaan bersumber dari dana BOS. Pelibatan para guru dan komite madrasah akan memperoleh perencanaan yang sesuai dengan kondisi sekolah dan secara moral kepala sekolah, semua guru dan komite madrasah merasa ikut bertanggung jawab terhadap

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Abrar, S.Pd.I, di Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala, 26 Januari 2019.

pelaksanaan rencana tersebut. Dalam penyusunan program dalam RKAM menuangkan banyak program pendidikan. Yang mana program tersebut berisi penerimaan dana yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan rincian belanja sekolah yang terdiri dari pengembangan perpustakaan, kegiatan PPDB/Matsama, kegiatan PBM dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan/ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, pemeliharaan/pengadaan sarana parwana, honorarium tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesi, dan pembelian/perawatan alat multimedia pembelajaran. Setelah RKAM tersusun dan disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan barulah kepala sekolah dan ketua komite madrasah mengesahkan RKAM tersebut. RKAM inilah yang diajukan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau sebagai dasar pencairan Dana BOS. Berikut ini adalah daftar rincian belanja MTs Hidayatullah :

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan
2. Biaya ulangan dan ujian
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru/Matsama
5. Pengembangan perpustakaan
6. Bahan/biaya pendidikan habis pakai seperti ATK, penyediaan bahan suku cadang alat kantor dan konsumsi harian guru
7. Biaya daya dan jasa seperti pembayaran listrik, air, pulsa dan internet

8. Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana madrasah.
9. Pembelian perangkat komputer untuk pelaksanaan UNBK
10. Pengembangan profesi
11. Biaya pengelolaan BOS.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Pelaksanaan pembiayaan merupakan tahapan selanjutnya setelah perencanaan. Pelaksanaan pembiayaan adalah serangkaian tindakan nyata yang dilakukan setelah adanya perencanaan, yang dimulai dari penyusunan anggaran, penyaluran biaya dan pembukuan. Sebagaimana pengertian dari fungsi pelaksanaan yaitu merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang direncanakan bersama. *Actuating* dimaknai juga sebagai upaya untuk membuat semua anggota organisasi agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian yang telah ditetapkan.

Setelah kegiatan perencanaan pembiayaan di MTs Hidayatullah tersusun, selanjutnya tinggal melaksanakan apa yang sudah ditetapkan dalam RKAM. Realisasi pelaksanaan pembiayaan dilaksanakan mulai awal tahun

ajaran baru yaitu pada bulan Juli, dengan membelanjakan pembiayaan baik berupa barang ataupun jasa, seperti belanja keperluan pembelajaran, pengadaan/perbaikan sarana prasarana madrasah dan pembayaran honor PTK (pendidik dan tenaga kependidikan). Sebelum melaksanakan kegiatan pembiayaan perlu didahului dengan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan pembiayaan berjalan optimal.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan, kepala madrasah Ibu MR mengemukakan “Setelah tersusunnya perencanaan pembiayaan yang tertuang dalam RKAM, maka RKAM inilah sebagai dasar kami untuk mencairkan dana BOS kepada pihak Kementerian Agama, dan setelah dana masuk ke rekening madrasah biasanya untuk tahap I (Januari – Juni) dana kami terima pada bulan Februari dan untuk tahap II (Juli-Desember) dicairkan pada bulan agustus, maka mulailah kami melaksanakan dan merealisasikan program yang sudah ditetapkan dalam RAKM. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan biasanya dimulai pada awal tahun ajaran baru yaitu di bulan Juli. Saya selaku kepala madrasah bertugas mengarahkan agar sesuai dengan aturan-aturan serta memberikan motivasi kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan pembiayaan ini agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan tidak menggunakan dana untuk keperluan yang tidak mendukung PBM. Sesuai dengan Juknis BOS ada 13 item yang harus dibiayai. Namun tidak semua

dapat kita laksanakan mengingat keterbatasan dana yang ada. Dengan persentasi setiap kegiatan bervariasi sesuai dengan prioritas.”⁹¹

Selanjutnya bendahara menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pembiayaan di MTs Hidayatullah mulai dilaksanakan pada saat tahun ajaran baru, tentunya sesuai dengan yang tercantum dalam RKAM, diantaranya pengadaan/perbaikan meja kursi siswa yang kurang/rusak, pengadaan keperluan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran seperti ATK, suku cadang alat kantor, pembayaran gaji guru, untuk perbaikan sarana prasarana madrasah seperti perbaikan gedung madrasah dan sarana prasarana lain seperti perbaikan meja kursi yang rusak, karena dana yang kita miliki sangat terbatas hanya mengharapkan dana BOS maka hanya bisa memperbaiki sarana prasarana yang sudah mulai rusak itupun dengan cara bertahap. Jadi tidak semua pelaksanaan kegiatan madrasah dapat terakomodir sebagaimana yang tercantum dalam komponen-komponen pembiayaan yang terdapat dalam juknis BOS. Sebelum pelaksanaan tugas pembiayaan dilakukan kepala madrasah tentunya terlebih dahulu memberikan pengarahan agar pelaksanaan pembiayaan bisa berjalan dengan baik.”⁹²

Selanjutnya hasil mewawancari dengan Ketua Komite Madrasah yang menyatakan : “Pelaksanaan keuangan madrasah ya tinggal melaksanakan hasil yang sudah ditetapkan bersama-sama, ya berjalan sesuai rencana. Kami

⁹¹Wawancara dengan Ibu Masriana, S.Ag, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

⁹²Wawancara dengan ST di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

menyerahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah tugas kami hanya memantau dan mengawal pelaksanaannya saja, apabila pihak madrasah kekurangan dana barulah komite dan yayasan turun tangan membantu mencari solusi atau jalan keluarnya.”⁹³

Ketiga sumber diatas mengungkapkan hal yang sama tentang pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan dilaksanakan mengacu kepada rencana yang sudah ditetapkan bersama-sama yang tertuang dalam RKAM dan sebelum pelaksanaan program kegiatan dilakukan kepala madrasah memberikan pengarahan dan memotivasi seluruh pelaksana kegiatan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan bekerjasama sama dengan baik.

Dari keterangan ketua komite madrasah diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah, komite dan yayasan hanya memantau dan mengawal bilamana madrasah mengalami kendala misalnya kekurangan anggaran maka pihak komite dan yayasan mencari solusi atau jalan keluarnya secara bersama-sama.

Kalau peneliti perhatikan keadaan sarana prasarana madrasah seperti gedung sekolah dan ruang belajar, masih perlu banyak perhatian dari pihak pengelola madrasah dan yayasan, seperti atap plafon madrasah yang sudah mulai banyak yang rusak. Meskipun keadaan sarana prasarana yang baik tidak menjamin sepenuhnya keberhasilan pendidikan, namun dengan keadaan

⁹³Wawancara dengan AB di MTs Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019

gedung dan ruang belajar yang memadai sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dan motivasi siswa dalam menerima materi pelajaran dan kenyamanan guru dalam menyampaikan pelajaran. Yang tentunya akan lebih meningkatkan kualitas hasil pendidikan yang diperoleh. Hendaknya perencanaan yang akan datang lebih memprioritaskan perbaikan sarana prasarana madrasah.

Selanjutnya terkait dengan proses/prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana yang disampaikan oleh kepala madrasah bahwa : “Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk setiap program kegiatan biasanya kepala urusan mengajukan rincian anggaran kegiatan yang terkait dengan program kerjanya yang sesuai dengan RKAM kepada saya selaku kepala madrasah, selanjutnya saya periksa dan koreksi apabila sudah sesuai maka di setujui, selanjutnya bendahara akan mengeluarkan dana yang diajukan dan mencatat semua pengeluaran dana.”⁹⁴

Senada dengan apa yang disampaikan oleh wakamad bidang Sarana Prasarana mengatakan bahwa : “Apabila ingin melaksanakan kegiatan program maka pelaksana kegiatan menyampaikan proposal/RAB kepada kepala madrasah, kemudian kepala madrasah memerintahkan kepada bendahara untuk mencairkan dana tersebut. Apabila terkait dengan pengadaan barang atau pengadaan sarpras madrasah maka setiap barang tersebut harus

⁹⁴Wawancara dengan MR di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

dicatat dan diberi nomor sebagai inventaris barang milik negara, meskipun dilakukan secara sederhana.⁹⁵

Selanjutnya pernyataan diatas diperkuat oleh penjelasan wakamad bidang kesiswaan : ”Prosedurnya ya kita membuat program kerja yang sesuai dengan RAPBM misalnya untuk kegiatan PPDB atau ekstrakurikuler siswa, maka saya harus membuat proposal dan rincian biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut, kemudian diajukan kepada kamad untuk dibaca, dan diteliti apakah sudah sesuai dengan rencana dan juga juknis, kalau sudah maka di acc dan selanjutnya bendahara mencairkan dana tersebut. Setelah dana cair maka mulailah dilaksanakan program kerja.”⁹⁶

Sedangkan menurut penjelasan kepala Tata Usaha: “Saya mengelola pembiayaan terkait pengadaan keperluan pembelajaran seperti ATK, suku cadang alat kantor, konsumsi harian guru, saya merinci semua keperluan untuk satu semester dan menyampaikan kepada kepala madrasah. Namun pembelian biasanya dilakukan untuk keperluan tiga bulan dulu apabila nanti masih ada barang lebih maka untuk pembelian pengadaan 3 bulan kedepan dikurangi agar tidak terjadi kelebihan/penumpukan barang seperti ATK. Dan dana bisa digunakan untuk keperluan yang lain.”⁹⁷

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Abrar, S.Pd.I, di MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019

⁹⁶Wawancara dengan Ibu Rusmiati, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 31 Januari 2019

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Harunur Rasyid, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 31 Januari 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat sumber di atas peneliti berkesimpulan bahwa Kepala madrasah MTs Hidayatullah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepala dan juga merupakan seorang manager dalam lembaga yang dipimpinnya, mempunyai tugas mengarahkan dan mengatur orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepala madrasah juga berfungsi sebagai motivator menciptakan tim yang solid dalam tata kelola manajemen pendidikan. Suksesnya manajemen sebuah lembaga pendidikan tidak lepas dari peran kepala madrasah yang mampu mengayomi seluruh elemen madrasah sehingga menjadi tim yang dapat bekerja sama dengan baik dalam memajukan madrasah untuk mencapai tujuan, visi dan misi madrasah.

Kepala madrasah harus menjadi agen perubahan menuju pengelolaan sekolah yang lebih baik. Tugas kepala madrasah memang berat, namun kepala MTs Hidayatullah mampu memberikan kepercayaan dan mendelegasikan pekerjaan kepada para wakil kepala madrasah, TU, bendahara dan para guru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga pekerjaan yang terasa berat tadi akan menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama sehingga semua warga madrasah merasa memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama memajukan madrasah ini.

Dalam pelaksanaan (*actuating*) pembiayaan, hal yang perlu diperhatikan dan tak kalah penting adalah penatausahaan keuangan pendidikan. Maka peneliti kemudian mewawancarai beberapa sumber yang

berkaitan dengan penatausahaan keuangan/pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber tentang pencatatan dan pembukuan keuangan, MR menjawab, “Pembukuan keuangan dapat dilihat dibendahara karena yang bertugas untuk mencatat dan membukukan seluruh pelaksanaan pembiayaan adalah bendahara, pembukuan terdiri dari BKU dan Buku Pembantu Pajak yang biasanya dilakukan setiap bulan dan ditutup pada akhir bulan dengan didukung berita acara penutupan kas. BKU ini ditandatangani oleh bendahara dan saya sebagai penanggung jawab. Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan seluruhnya dicatat dalam BKU.”⁹⁸ Hal senada dikatakan RM “terkait dengan pembukuan biasanya yang mencatat adalah bendahara, saya selaku koordinator bidang kesiswaan menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran terkait dengan kegiatan kesiswaan seperti nota dan kwitansi pembelian barang dan daftar tanda terima apabila ada pemberian insentif atau honor seperti honor pembimbing kegiatan ekstrakurikuler disampaikan kepada bendahara untuk dicatat dan disimpan sebagai bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban.”⁹⁹

Menurut wakamad bidang sarana prasarana ”Saya mengelola bidang sarpras, saya mempunyai sendiri pencatatan dan pembukuan sendiri yang

⁹⁸Wawancara dengan Ibu Masriana, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 16 Januari 2019

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Rusmiati, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019

berhubungan dengan pembiayaan bidang sarana prasarana, pembukuan dan pendukungnya berupa nota – nota pembelian dan pembayaran honor tukang, foto-foto kegiatan, RAB selanjutnya diserahkan kepada kepala sekolah untuk dicek kemudian diserahkan lagi kepada bendahara untuk dicatat dan dibukukan dalam BKU yang merupakan pencatatan umum seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan.”¹⁰⁰

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan yang serupa yang disampaikan oleh bendahara : “Pembukuan kami lengkap tertuang dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Pajak, untuk tahun ini pembukuan lebih simpel sesuai dengan juknis BOS Tahun 2018 pembukuan hanya terdiri dari BKU dan Buku Pembantu Pajak, beda dengan tahun – tahun sebelumnya masih ditambah buku pembantu kas dan buku pembantu bank. Ini lebih memudahkan kami dalam menyusun dan mencatat pembukuan keuangan, seluruh pencatatan masuk dalam BKU.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat sumber peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembiayaan/keuangan di MTs Hidayatullah sudah melaksanakan penatausahaan keuangan dengan baik, bendahara mencatat seluruh transaksi keuangan madrasah baik pemasukan maupun pengeluaran dana sesuai dengan kronologis yang didukung oleh dokumen keuangan seperti nota, kwitansi dan

¹⁰⁰Wawancara dengan Bapak Abrar, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Seniarti, S.Pd.I, di Bahaur,

daftar tanda terima, yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya dari keterangan RM dan AB sangat jelas terlihat bahwa dalam melaksanakan keuangan madrasah terdapat fungsi pengorganisasian yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing baik itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakamad sebagai pelaksana dan pengelola bidang, dan bendahara selaku penanggung jawab terhadap pembukuan keuangan madrasah, meskipun dana yang mereka kelola tidak seberapa tetapi mereka sudah berusaha untuk melaksanakan administrasi dan manajemen pembiayaan sekolah dengan baik meski dengan cara dan sarana sederhana.

Selanjutnya saya meminta ijin kepada bendahara untuk melihat Dokumen administrasi keuangan dan dokumen realisasi anggaran keuangan madrasah, kemudian bendahara memberikan dokumen tersebut seperti BKU, buku pembantu pajak dan LPJ Penggunaan Dana BOS Tahun anggaran 2018.

Selanjutnya terkait dengan pengalokasian dana untuk pembayaran honorarium dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, sebagaimana diketahui bahwa pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah hanya bersumber dari dana BOS. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi kepala madrasah dan pengelola keuangan di MTs Hidayatullah dalam pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh salah seorang guru senior ZR ”Niat kami membantu mengajar dimadrasah ini adalah lillahita’ala untuk mengabdikan kepada masyarakat dan pendidikan agama, masalah gaji tidak menjadi soal banyak atau sedikit yang penting berkah. Motto kami sesuai dengan motto Kementerian Agama yaitu Ikhlas Beramal.”¹⁰²

Hal ini sangat menarik simpatis peneiti, di zaman yang modern ini tidak banyak kita jumpai lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan swasta yang dalam membangun institusinya dengan ikhlas untuk kepentingan pendidikan agama dan masyarakat. Meskipun gaji/honor yang mereka terima tidak seberapa apabila dibandingkan dengan guru-guru dan tenaga kependidikan yang mengajar pada sekolah – sekolah swasta yang berada di perkotaan dan sekolah negeri, namun karena orang-orang yang bekerja dan mengabdikan di madrasah ini adalah orang-orang yang pendidikannya sudah dibekali keimanan, terlihat dari mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan ikhlas dalam menjalankan tugas untuk kemajuan madrasah.

¹⁰²Wawancara dengan Ibu Zirqah Diniyah, S.Pd.I di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 31 Januari 2019

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat attaubah : 105 :¹⁰³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa amal baik yang diserukan Allah kepada Rasul-Nya adalah pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang yang beriman. Artinya amal perbuatan tersebut dikerjakan hanya karena mencari keridhaan Allah, terdorong dengan niat yang ikhlas, berlandaskan iman dan takwa, serta adanya niat khidmah yang tulus tanpa pamrih. Kata amal yang disebutkan dalam ayat "i'maluu/ amal" mengandung arti "bekerjalah/ kerja". Amal yang dimaksudkan bukan bermakna khusus yang hanya terbatas amalan sholat, puasa, haji dan sebagainya, akan tetapi amal yang dimaksudkan adalah meliputi semua pekerjaan yang bernilai ibadah.¹⁰⁴

Dari uji dokumen yang peneliti lakukan dapat terlihat gambaran gaji/honor guru dan tenaga kependidikan di MTs Hidayatullah, guru – guru yang berstatus PNS dan guru non PNS yang sudah mendapatkan tunjangan

¹⁰³ At-Taubah: 105

¹⁰⁴ [https://www.kabar-banten.com/bekerja-ikhlas/Kholid Ma'mun/Pengajar di Ponpes Daar El Istiqomah Kota Serang, pengurus FSPP Kota Serang & Pengurus MUI Prov. Banten\).](https://www.kabar-banten.com/bekerja-ikhlas/Kholid_Ma'mun/Pengajar_di_Ponpes_Daar_El_Istiqomah_Kota_Serang_pengurus_FSPP_Kota_Serang_&_Pengurus_MUI_Prov._Banten)

sertifikasi tidak menerima gaji/honor lagi dari madrasah. Hanya guru yang belum sertifikasi dan tenaga kependidikan yang dibayarkan honorinya oleh pihak madrasah yaitu diambilkan dari dana BOS. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru senior yang sudah sertifikasi yaitu ibu RJ menyatakan : “ saya dan beberapa guru honorer yang sudah sertifikasi tidak menerima honor lagi dari madrasah ini, karena kami sudah dibayarkan tunjangan profesi oleh Kantor Kemenag Kab. Pulang Pisau, saya termasuk guru Non PNS yang belum inpassing sehingga dibayarkan tunjangan profesi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Beda dengan yang sudah inpassing mereka menerima tunjangan profesi lebih besar yaitu setara dengan gaji pokok PNS, meskipun beban mengajar kami sama.”¹⁰⁵

Apabila dilihat dari Juknis penggunaan dana BOS bagi madrasah, disana memang sudah ditetapkan bahwa guru PNS dan Guru yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak boleh lagi menerima honor dari Dana BOS. Untuk guru non PNS yang sudah sertifikasi maka gajinya dibayarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, ada dua kategori untuk guru non PNS yaitu Guru non PNS Inpassing dan guru non PNS belum Inpassing, bagi guru non PNS inpassing dibayarkan tunjangan profesinya setara dengan gaji pokok PNS sesuai dengan pangkat golongan ruangnya namun tidak memperhitungkan masa kerja sehingga rata-rata gaji yang

¹⁰⁵Wawancara dengan Ibu Dra. Ratna Juami di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 5 Februari 2019

mereka terima untuk golongan III sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan seterusnya. Dan bagi guru non PNS belum inpassing menerima tunjangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Untuk guru honor yang belum sertifikasi dan pegawai administrasi dibayarkan honorinya langsung dari dana BOS, sehingga pemanfaatan dana BOS untuk pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan dapat dioptimalkan. Sehingga pihak madrasah tidak memikirkan lagi untuk gaji/honor guru PNS yang diperbantukan dan guru honor yang sudah sertifikasi, terkecuali mereka ada kelebihan jam mengajar atau menjadi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler baru dibayarkan honorinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh AB yang menyatakan : “Status saya disini adalah guru PNS yang diperbantukan di MTs ini, saya tidak menerima honor dari pihak madrasah/yayasan, karena saya sudah mempunyai gaji dan sudah mendapatkan tunjangan profesi. Saya senang bisa membantu madrasah ini bersama dengan beberapa orang guru PNS yang lain.”¹⁰⁶

Berikut ini gambaran gaji/honor yang diterima oleh guru dan tenaga kependidikan di MTs Hidayatullah yang dibayarkan dari dana BOS:

Wawancara dengan Bapak Abrar, S.Pd.I, di Bahaur Kec. Kahayan Kuala, 26 Januari 2019

Tabel 4.8
Daftar Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan
MTs Hidayatullah yang dibayarkan dari dana BOS¹⁰⁷

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PERBULAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Zirqah Diniyah, S.Pd.I	Guru	513.500,-
2	Abdurrahman, S.Pd.I	Guru	513.500,-
3	Nina Rustina Ningsih, S.Pd.I	Guru	513.500,-
4	Nor Aning Herlianti, S.Pd.I	Guru	513.500,-
5	M.Ilham Masyuri, S.Pd.I	Guru	513.500,-
6	Abdul Malik Amrullah, S.Pd	Guru	513.500,-
7	Hamdah, S.Pd	Guru	513.500,-
8	Seniarti, S.Pd.I	Bendahara	513.500,-
9	Mad'an Anshori, S.Pd.I	TU	513.500,-
10	Rahmat Hidayat, S.Pd.I	TU	513.500,-

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Untuk mengetahui jalannya aktifitas pembiayaan pendidikan diperlukan adanya *controlling* atau pengawasan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam aktifitas pembiayaan pendidikan kegiatan pengawasan monitoring atau supervisi yang berguna untuk memberikan penilaian sementara terhadap pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai yang direncanakan agar terhindar dari kesalahan dalam penggunaan dana

¹⁰⁷ LPJ BOS MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau Tahun 2018.

APBM (anggaran pendapatan dan belanja madrasah). Untuk mengetahui apakah *budget*/pembiayaan sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan program madrasah maka peneliti mewawancarai beberapa sumber berikut :

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Islam tentang pelaksanaan pengawasan, KH menyatakan :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah dalam bentuk monitoring dan supervisi yaitu melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.

Lebih lanjut KH mengatakan :

“Secara umum pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana BOS yang diterima oleh madrasah sudah digunakan dengan tepat baik jumlah, waktu, cara, dan penggunaan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dan memberikan bimbingan-bimbingan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana. Pengawasan ini kami lakukan setiap satu semester sesuai dengan pencairan dana BOS”¹⁰⁸

Senada dengan pernyataan SN, “Pengawasan pembiayaan pendidikan diMTs Hidayatullah dilakukan oleh beberapa pihak terdiri dari pihak intern dan pihak ektern, dari pihak intern dilakukan oleh kepala madrasah, komite sekolah dan yayasan. Sedangkan dari pihak ektern dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Pulang Pisau melalui Seksi Pendidikan Islam dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag RI. Biasanya kepala madrasah melakukan supervisi setiap triwulan sekali, sedangkan dari Komite dan yayasan tidak tentu

¹⁰⁸ Wawancara dengan KH di Pulang Pisau, 20 Februari 2019

kadang-kadang hanya sesekali datang. Dari pihak kemenag biasanya setiap satu semester setelah pencairan dana BOS datang untuk melakukan monev. Kalau Irjen biasanya pengawasannya sudah dalam bentuk audit. Dan berdasarkan informasi dari kemenag bahwa audit Irjen akan dilakukan pada bulan Maret yang akan datang.”¹⁰⁹ Hal tersebut dibenarkan oleh MR yang menyatakan bahwa saya selaku kepala madrasah melakukan pengawasan keuangan dengan melakukan supervisi terkait dengan pelaksanaan keuangan di MTs ini, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan perencanaan dan berjalan sesuai dengan aturan dan juknis yang sudah ditetapkan dan yang terpenting adalah bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan tidak terjadi pemborosan, karena dana kita terbatas maka harus digunakan secara efektif dan efisien untuk keperluan pengeloaan pendidikan. Pengawasan / supervisi biasanya saya lakukan setiap 3 bulan sekali.¹¹⁰

Lebih lanjut MR menyatakan : “Pemantaun juga sekali-sekali dilakukan oleh pihak yayasan dan komite madrasah, tapi lebih sering diserahkan kepada kami pihak madrasah.”¹¹¹

Hal tersebut didibenarkan oleh ketua komite : “Pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan kami serahkan sepenuhnya kepada kepala madrasah, kami hanya memantau dan berkomunikasi dengan kepala madrasah.

¹⁰⁹ Wawancara dengan HR dan MR di Bahaur, 31 Januari 2019

¹¹¹ Wawancara dengan MR di Bahaur, 16 Januari 2019

Lebih lanjut ketua yayasan mengatakan “Ya kita tidak secara langsung melakukan pengawasan hanya memantau, komunikasi dan koordinasi dengan pihak madrasah bagaimana jalannya semua program yang berkaitan dengan pembiayaan.

Dari keterangan dari ketua komite dan ketua komite diketahui bahwa tidak ada pengawasan secara langsung dari pihak yayasan dan komite. Tetapi komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan oleh pihak madrasah kepada yayasan dan komite madrasah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber dan hasil observasi peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepala madrasah dan Kasi Pendidikan Islam telah melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan. Kasi Pendis melakukan pengawasan dua kali dalam setahun yaitu setelah dilakukan pencairan dana BOS kepada madrasah sedangkan kepala madrasah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan di MTs Hidayatullah setiap tiga bulan sekali. Dan tujuan dari pelaksanaan supervisi/pengawasan adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan program yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang dari aturan dan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya telah dilakukan dengan cara efektif dan efisien artinya dalam pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan tepat, hemat dan cermat baik bahan, waktu, tenaga dan biaya. Sehingga dalam pengelolaan pembiayaan di madrasah tidak terjadi pemborosan.

Hasil wawancara tentang apa saja yang diperiksa dalam pengawasan, kepala madrasah menjawab : “Yang saya lihat dalam supervisi keuangan adalah yang pertama pengecekan apakah pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan RAKM yang sudah ditetapkan, kedua mengecek BKU apakah jumlah pengeluaran dan penerimaan setiap triwulan sudah sesuai atau belum, kemudian mencocokkan bukti fisik pembelanjaan dan pengeluaran dengan nota/kwitansi dan daftar tanda terima serta berkas-berkas yang berkaitan lainnya.”¹¹²

Sedangkan Kasi Pendis menyatakan :

Biasanya yang pertama kami periksa adalah apakah rencana penggunaan anggaran atau biasa disebut RKAM sudah dipasang dipapan pengumuman, kemudian memeriksa BKU, Buku Pembantu Pajak terkait apakah ada pajak yang harus dibayarkan atau tidak, bukti fisik penggunaan dana baik dalam bentuk pencatatan, bukti-bukti pembelanjaan baik barang atau jasa, apabila terdapat kegiatan perbaikan sarana prasarana madrasah maka kami akan melihat hasil perbaikan tersebut apakah sudah dilaksanakan atau belum. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai maka kami akan memberikan catatan-catatan dan arahan-arahan untuk perbaikan.¹¹³

Hal serupa disampaikan oleh bendahara : “Dalam pengawasan biasanya yang diperiksa adalah BKU, apakah pencatatan sudah sesuai antara penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkan bukti – bukti pengeluaran seperti nota pembelian, kwitansi dan bukti fisik barang. Contoh seperti

¹¹²Wawancara dengan MR di Bahaur, 16 Januari 2019

¹¹³Wawancara dengan KH di Pulang Pisau, 20 Februari 2019

pembelian buku teks pelajaran untuk siswa, di BKU kan tertulis tanggal pembelian, banyaknya dan nominal uangnya, nah ini yang dicocokkan bukunya, jumlahnya dan barangnya apakah sudah sesuai atau belum.”¹¹⁴

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan pengawasan merupakan sesuatu yang harus ada dalam manajemen pembiayaan, dan merupakan aktivitas yang terpenting, karena bagaimanapun baiknya sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kemungkinan penyimpangan bisa saja terjadi.

Hasil akhir dari pengendalian pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah berupa laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara madrasah untuk kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan evaluasi yaitu kepala madrasah, pihak yayasan dan Tim BOS pada Seksi Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten Pulang Pisau. Yang nantinya sebagai bahan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI apabila sewaktu-waktu datang.

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban, bendahara menyatakan : “Kami membuat laporan pertanggungjawaban BOS dua kali setahun yaitu setiap satu semester, yang berisi tentang semua bukti-bukti yang terkait dengan penggunaan Dana BOS selama satu semester disusun berdasarkan 13

¹¹⁴Wawancara dengan SN di Bahaur, 16 Januari 2019

item yang tercantum dalam juknis BOS. Karena dana yang kita kelola adalah dana dari pemerintah maka dalam penggunaannya tidak boleh keluar dari komponen-komponen kegiatan yang diperbolehkan dalam juknis. Realisasi penggunaan anggaran Dana BOS biasanya juga dipasang dipapan pengumuman madrasah agar semua pihak dapat mengetahui untuk apa saja Dana BOS digunakan.”

Lebih lanjut bendahara mengatakan : “Laporan tersebut disampaikan kepada kepala madrasah, komite dan pihak yayasan, serta kepada Tim BOS Kemenag Kab. Pulang Pisau sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.”¹¹⁵

Senada dengan yang disampaikan oleh kepala madrasah : “Karena dana yang kami kelola adalah dana BOS, sesuai dengan ketentuan bahwa pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat persemester sesuai dengan dana yang dicairkan. Ya Kalau laporan keuangan disampaikan oleh bendahara setiap bulan tapi ya kadang-kadang dua bulan sekali sesuai kondisional . kalau LPJ disampaikan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau melalui TIM BOS Seksi Pendidikan Islam. Ditembuskan kepada Yaysasan.”¹¹⁶

Pernyataan kepala madrasah diperkuat oleh kepala tata usaha yang mengatakan : “Biasanya LPJ BOS disusun oleh bendahara, namun kadang-

¹¹⁵Wawancara dengan SN di Bahaur, 16 Januari 2019

¹¹⁶Wawancara dengan MRdi Bahaur, 16 Januari 2019

kadang saya dan juga kawan-kawan yang lain ikut membantu. LPJ dibuat dua kali setahun yaitu persemester dan disampaikan kepada yayasan dan Kemenag.¹¹⁷

Kasi Pendis terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban menyatakan :

MTs Hidayatullah merupakan penerima dana BOS terbesar untuk Tingkat MTs swasta karena memiliki jumlah siswa terbanyak dibandingkan dengan MTs swasta lain yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini. Dalam hal pelaporan pertanggungjawaban termasuk yang terbaik dan penyampaian LPJ selalu tepat waktu. Terbukti pada saat pemeriksaan/audit Dana BOS madrasah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2018 mendapatkan nilai yang bagus dibandingkan dengan Madrasah Negeri.¹¹⁸

Lebih lanjut Kasi Pendis menjelaskan :

Kepala MTs Hidayatullah dan Bendahara mempunyai komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Tim BOS Kabupaten, apabila ada hal-hal yang dirasa kurang dipahami mereka tidak segan-segan untuk meminta bantuan dan penjelasan kepada Tim BOS Kabupaten baik terkait penggunaan dana maupun pembuatan LPJ. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dan tanpa pamrih dalam memajukan pendidikan islam diwilayah kecamatan Kahayan Kuala.¹¹⁹

Dari uraian di atas diketahui bahwa pengelola keuangan MTs Hidayatullah Kec. Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau sudah menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik sesuai dengan juknis dan aturan yang telah ditentukan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada

¹¹⁷Wawancara dengan HR di Bahaur, 31 Januari 2019

¹¹⁸Wawancara dengan KH di Pulang Pisau, 20 Februari 2019

¹¹⁹*ibid*

pihak – pihak yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut ini peneliti akan memaparkan tentang data hasil penelitian dan temuan hasil penelitian, sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Dari seluruh rangkaian kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa rangkaian – rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan diatas sudah sesuai dengan teori tentang perencanaan pembiayaan pendidikan oleh Utari yang menyatakan bahwa : Proses penyusunan perencanaan kegiatan anggaran sekolah dengan langkah – langkah sebagai berikut : a) Menginventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya, b) Inventarisasi sumber pembiayaan, c) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Berikut akan peneliti paparkan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembiayaan, sebagai berikut :

Pertama, dalam menginventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya, MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang pertama dilakukan oleh kepala madrasah adalah melakukan rapat bersama dengan bendahara,

wakil kepala madrasah (bidang kurikulum, kesiswaan dan sarana prasarana), ketua komite, kepala TU dan beberapa guru senior, dalam rapat tersebut membahas tentang program kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan selama periode satu tahun kedepan. Dan didalam rapat tersebut juga membahas tentang evaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut kepala sekolah dan tim menyusun dan mengumpulkan seluruh usulan dan masukan dari peserta rapat yang kemudian akan dibahas bersama-sama penyusunan program berdasarkan skala prioritas yang menjadi kebutuhan madrasah yang harus dilaksanakan terutama kegiatan yang mendukung PBM yang nantinya disesuaikan dengan keadaan pendanaan madrasah.

Perencanaan disusun dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan melihat dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan ditahun sebelumnya. Misalnya pada tahun sebelumnya sebagian dana dipergunakan untuk memenuhi keperluan pengadaan buku K13 mapel umum, maka untuk tahun ini pengadaan dikurangi kemudian dialihkan kepada kegiatan yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan. Sehubungan dilingkungan Kementerian Agama pada tahun 2019 ini semua Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah wajib melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), maka salah satu prioritasnya adalah untuk kegiatan tersebut dan pengadaan sarana prasarana terkait pelaksanaan UNBK seperti pengadaan Komputer.

Kedua, Langkah penyusunan perencanaan keuangan yang dilakukan di MTs Hidayatullah selanjutnya adalah menginventarisasi sumber keuangan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang sudah dirumuskan untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

Untuk sumber pendapatan dan penerimaan sekolah dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, organisasi dan perorangan. Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek (DIP). Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah.¹²⁰

Dari hasil temuan peneliti, sumber utama yang didapat oleh MTs Hidayatullah adalah dari pemerintah berupa BOS. Dana tersebut yang sangat menunjang kelangsungan proses kegiatan di sekolah, baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lain diluar itu. Madrasah tidak memungut biaya dari siswa/orang tua maupun masyarakat. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua siswa dan masyarakat, kontribusi dari masyarakat merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Pemerintah belum dapat membangun fasilitas pendidikan yang baik,

¹²⁰ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan ...* h. 120.

menyediakan guru yang cakap, dan menyediakan dana untuk berbagai program sekolah. Sehingga orang tua peserta didik mempunyai tanggung jawab untuk menyumbang dana maupun berbagai peralatan yang diperlukan oleh sekolah. Apalagi bagi sekolah swasta seperti MTs Hidayatullah meskipun sudah mendapatkan dana BOS namun masih belum mampu memenuhi seluruh pelaksanaan pembiayaan operasional pendidikan, untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut madrasah harus pintar-pintar dalam mencari dana baik dari siswa/orang tua, masyarakat, sumbangan donator maupun kegiatan wirausaha sekolah. Disinilah peran komite sekolah sebagai organisasi mitra sekolah sangat diperlukan dalam rangka turut serta mengembangkan pendidikan disekolah/madrasah.

Ketiga, penyusunan rencana kegiatan anggaran madrasah (RKAM), setelah kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan tersusun dan sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut adalah dana BOS, maka selanjutnya tinggal menyusun perencanaan tersebut kedalam format resmi yang disediakan sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis BOS madrasah, format tersebut meliputi sumber pendapatan, dan pengeluaran yang terdiri dari penganggaran pengembangan perpustakaan, kegiatan PPDB/Matsama, kegiatan PBM dan ekstrakurikuler, kegiatan ulangan/ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, pemeliharaan/pengadaan sarana parasana, honorarium tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan profesi, dan pembelian/perawatan alat

multimedia pembelajaran. Kemudian RKAM dirinci persemester yaitu semester I (Juli sd Desember) dan semester II (Januari – Juni). Setelah RKAM tersusun dan disampaikan kepada seluruh warga sekolah dan sudah disetujui, maka RKAM ditandatangani oleh bendahara, disyahkan oleh Kepala Sekolah dan ketua komite. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang sudah ditetapkan dan disyahkan inilah yang akan diusulkan kepada Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau untuk mencairkan dana Bantuan Operasional (BOS).

Dari langkah – langkah kegiatan perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau diatas, dapat digambarkan bahwa kegiatan perencanaan dilakukan dengan menginventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan ditahun sebelumnya, menginventarisasi sumber dana dan menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah. Kegiatan - kegiatan perencanaan sudah dilakukan oleh kepala madrasah sesuai dengan perintah Allah Dalam Alqur'an surah Al-Hasr ayat 18,¹²¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

¹²¹Kamrani Buseri, *Administrasi Manajemen Pendidikan Islam, Paradigma, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017, h. 135.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Bahwa perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, dipahami sebagai perintah untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang telah diperbuat/dilakukan dimasa lalu untuk merencanakan hal-hal yang diinginkan (baik) di masa-masa yang akan datang. Sebuah perencanaan selalu saja didahului oleh kegiatan memperhatikan sesuatu capaian sebelumnya, dan atas dasar penilaian capaian tersebut, maka disusunlah perencanaan ke depan.

Kemudian hal tersebut sesuai dengan teori Garton dan Sneider bahwa :

penyusunan anggaran sekolah harus memperhatikan *performance budgeting*, yaitu konsep penganggaran yang menitikberatkan segi yang ingin dicapai dan menjadi prioritas, sekolah menyusun Rencana anggaran dibahas oleh berbagai pihak yang berwenang untuk disetujui dan disahkan untuk periode satu tahun.¹²²

Perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh MTs Hidayatullah dengan memperhatikan skala prioritas dengan rencana yang telahditetapkan sesuai konsep dengan sumber pembiayaannya berasal dari dana BOS, untuk mencapai tujuan yang telah digariskan guna perbaikansistem di masa mendatang dengan sarana yang optimal.

¹²²Garton dan Sneider dikutip oleh Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek*, Bandung : Alfabeta, 2017, h. 37.

Perencanaan pembiayaan pendidikan mengandung unsur-unsur sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan madrasah dalam waktu tertentu. Perencanaan pembiayaan bermanfaat sebagai :

- 1) Pemilihan berbagai alternatif terbaik
- 2) Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
- 3) Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi
- 4) Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan
- 5) Meningkatkan kinerja.¹²³

Proses perencanaan pembiayaan pendidikan yang sudah dilaksanakan oleh MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau jika dilihat dari kondisi riil dilapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber diatas sudah berjalan dengan baik. Hanya saja untuk penggalan sumber pendanaan madrasah masih terfokus pada bantuan dana dari pemerintah, hendaknya pihak yayasan, kepala madrasah dan Tim pengelola keuangan madrasah lebih giat dan kreatif lagi dalam mencari celah agar bisa menambah pendanaan madrasah baik dari siswa/orang tua siswa, masyarakat ataupun dari hasil usaha sendiri dan hasil karya peserta didik, kantin madrasah dan koperasi madrasah. Sehingga pelaksanaan kegiatan pendidikan yang tidak mampu dibiayai oleh dana BOS dapat dilaksanakan.

¹²³ Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan*, PT Bumi Aksara Indah, Yogyakarta : 2013, hlm.76.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Dari data-data dan informasi yang peneliti temukan, berikut akan peneliti sampaikan kegiatan pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Ada dua kegiatan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam melaksanakan keuangan sekolah yaitu pembelanjaan keuangan sekolah dan pembukuan keuangan sekolah.

Dalam membelanjakan keuangan kepala madrasah dan tim pengelola keuangan mengacu kepada rencana yang sudah ditetapkan bersama-sama yang tertuang dalam RKAM yaitu terdiri dari :

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan
2. Biaya ulangan dan ujian
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Kegiatan Penerimaan Siswa Baru/Matsama
5. Pengembangan perpustakaan
6. Bahan/biaya pendidikan habis pakai seperti ATK, penyediaan bahan suku cadang alat kantor dan konsumsi harian guru
7. Biaya daya dan jasa seperti pembayaran listrik, air, pulsa dan internet
8. Pemeliharaan dan perawatan gedung dan sarana prasarana madrasah.
9. Pembelian perangkat komputer untuk pelaksanaan UNBK
10. Bantuan Siswa Miskin

11. Pengembangan profesi

12. Biaya pengelolaan BOS

Kegiatan diatas adalah kegiatan yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan, kalau menurut juknis BOS ada beberapa kegiatan lagi yang harus dilaksanakan, namun dianggap tidak terlalu penting sehingga kegiatannya bisa ditunda pelaksanaannya.

Pembelanjaan dimulai pada awal tahun ajaran baru yaitu pada bulan Juli, sebelum melaksanakan kegiatan pembiayaan perlu didahului dengan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan pembiayaan berjalan optimal. sebelum pelaksanaan program kegiatan dilakukan kepala madrasah memberikan pengarahan dan memotivasi seluruh pelaksana kegiatan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan bekerjasama sama dengan baik. Dan menggunakan dana dengan hemat dan seefektif mungkin agar seluruh pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan.

Pelaksana / penanggung jawab program kegiatan diserahkan kepada tim pengelola keuangan MTs Hidayatullah yaitu terdiri dari wakamad kurikulum, wakamad kesiswaan, wakamad sarana prasarana, kepala tata usaha, dan bendahara. Sedangkan berdasarkan keterangan ketua komite madrasah dan yayasan diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan diserahkan sepenuhnya kepada pihak madrasah, komite dan yayasan hanya memantau

dan mengawal bilamana madrasah mengalami kendala misalnya kekurangan anggaran maka pihak komite dan yayasan mencari solusi atau jalan keluarnya secara bersama-sama.

Dari keterangan diatas sangat jelas terlihat bahwa dalam melaksanakan keuangan madrasah terdapat fungsi pengorganisasian yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing baik itu kepala sekolah sebagai penanggung jawab, wakamad sebagai pelaksana dan pengelola bidang, dan bendahara selaku penanggung jawab terhadap pembukuan keuangan madrasah, meskipun dana yang mereka kelola tidak seberapa tetapi mereka sudah berusaha untuk melaksanakan administrasi dan manajemen pembiayaan sekolah dengan baik meski dengan cara dan sarana sederhana.

Selanjutnya adalah penyelenggaraan pembukuan keuangan sekolah, dari data-data dan informasi tentang pembukuan keuangan yang dilaksanakan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, peneliti menemukan bahwa yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengelola pembukuan keuangan di MTs Hidayatullah adalah bendahara, bendahara diberikan tugas oleh kepala madrasah untuk menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan anggaran yang disetujui kepala madrasah. Bendahara mencatat seluruh transaksi keuangan madrasah baik pemasukan maupun pengeluaran dana sesuai dengan kronologis yang didukung oleh dokumen keuangan seperti nota, kwitansi yang diberi materai dan daftar tanda terima honor/gaji. Pembukuan

keuangan di MTs Hidayatullah terdiri dari Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Pajak (BPP), BKU merupakan buku harian yang digunakan untuk untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang dicatat oleh bendahara dalam BKU, setiap akhir bulan buku kas ditutup dengan saldo akhir dan ditandatangani oleh bendahara dan disyahkan oleh kepala sekolah, sedangkan BPP berfungsi untuk mencatat beban pajak yang harus dikeluarkan/disetor ke Kas Negara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari paparan diatas menunjukan bahwa pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau sudah dilakukan dengan baik, setelah tersusunnya RKAM sebagai dasar penganggaran di madrasah, maka MTs Hidayatullah selanjutnya tinggal melaksanakan apa yang tercantum di dalam RKAM tersebut yaitu melalui dua kegiatan pembelanjaan keuangan sekolah dan penyelenggaraan pembukuan sekolah. Walaupun masih dalam proses yang sederhana karena dana yang dikelola hanya terbatas pada dana BOS.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Gunawan bahwa Sekolah setelah menetapkan RKAS menjadi anggaran sekolah, dengan memperhatikan persentase pendistribusian anggaran kepada setiap mata anggaran, selanjutnya sekolah melaksanakan pembelanjaan keuangan sekolah dan setiap transaksi dicatat dalam pembukuan keuangan sekolah serta bukti –

bukti penggunaan anggaran disimpan sebagai bahan laporan keuangan sekolah.¹²⁴

Lembaga pendidikan Islam dalam melaksanakan dan mengelola keuangan hendaknya memperhatikan beberapa hal :

4. Hemat sesuai dengan kebutuhan
5. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana.
6. Tidak menggunakan dana untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa kepala kantor, satuan kerja, pimpinan proyek, bendaharawan, dan orang atau badan yang menerima, menguasai uang Negara wajib menyelenggarakan pembukuan. MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini juga sebagai satuan kerja yang menerima dana dari pemerintah sudah menyelenggarakan pembukuan.

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau

Dari data-data dan informasi yang peneliti dapatkan tentang pengawasan pembiayaan pendidikan, peneliti akan menyampaikan informasi dan temuan yang didapatkan. Peneliti menemukan bahwa kegiatan

¹²⁴ Imam Gunawan dan Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan : Suatu Pengantar Praktek, Bandung: Alfabeta, 2017, h. 377

pelaksanaan pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan pembiayaan/keuangan pendidikan di MTs Hidayatullah dilakukan oleh pihak intern dan ekstern, pihak intern dilakukan oleh kepala madrasah, komite sekolah dan yayasan sedangkan pihak ekstern dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau melalui Seksi Pendidikan Islam dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama RI.
2. Pengawasan oleh kepala madrasah dilakukan setiap triwulan dalam bentuk supervisi, sedangkan dari pihak komite dan yayasan tidak ada pengawasan secara langsung lebih banyak diserahkan kepada pihak madrasah yaitu kepala madrasah, komite dan yayasan hanya memantau, komunikasi dan koordinasi dengan kepala madrasah sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan. Sedangkan pengawasan dari Kemenag dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu setelah pencairan dana BOS tahap I (Januari – Juni) dan Tahap II (Juli – Desember) dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev). Pengawasan dari Irjen Kemenag RI sudah dalam bentuk audit dan pelaksanaannya tidak dapat ditentukan.
3. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan baik oleh kepala madrasah maupun kemenag adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan program yang sudah ditetapkan dan tidak menyimpang dari aturan dan petunjuk teknis yang

sudah ditetapkan serta dalam pelaksanaannya telah dilakukan dengan cara efektif dan efisien artinya dalam pelaksanaan pembiayaan dilakukan dengan tepat, hemat dan cermat baik bahan, waktu, tenaga dan biaya. Sehingga dalam pengelolaan pembiayaan di madrasah tidak terjadi pemborosan.

4. Hal-hal yang diperiksa/dikoreksi/dinilai adalah 1) Kepala Madrasah yaitu pertama, pengecekan apakah pembelanjaan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan (RAKM) yang sudah ditetapkan, kedua mengecek BKU apakah jumlah pengeluaran dan penerimaan setiap triwulan sudah sesuai atau belum, kemudian mencocokkan bukti fisik pembelanjaan dan pengeluaran dengan nota/kwitansi dan daftar tanda terima serta berkas-berkas yang berkaitan lainnya. 2) Kementerian Agama, yang diperiksa adalah peratama, apakah rencana penggunaan anggaran atau biasa disebut RKAM sudah dipasang dipapan pengumuman, kedua, BKU, Buku Pembantu Pajak (BPP) terkait apakah ada pajak yang harus dibayarkan atau tidak, bukti fisik penggunaan dana baik dalam bentuk pencatatan, bukti-bukti pembelanjaan baik barang atau jasa, ketiga, bukti fisik pelaksanaan perbaikan/pemeliharaan sarana prasarana madrasah.
5. Apabila ada kesalahan atau hal – hal yang kurang sesuai maka kepala madrasah dan pihak kemenag akan memberikan arahan-arahan untuk memperbaiki kesalahan – keasalahan yang terjadi.

6. Hasil akhir dari pelaksanaan pengendalian pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah adalah berupa laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan evaluasi yaitu kepala madrasah, pihak yayasan dan Tim BOS pada Seksi Pendidikan Islam Kemenag Kabupaten Pulang Pisau. Yang nantinya sebagai bahan audit oleh Inspektorat Jenderal Kemenag RI apabila sewaktu-waktu datang.

Dari hasil yang didapatkan peneliti diatas jika dihadapkan dengan teori pengawasan ada kesesuaian, hal ini dapat dilihat dari teori Matin tentang pengawasan yaitu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹²⁵

Dalam pendidikan islam pengawasan adalah proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan secara konsekuen, baik materiil maupun spiritual, untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.¹²⁶

¹²⁵Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 185.

¹²⁶Syaefullah, U,KH, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.

Control mempunyai peranan yang penting dalam manajemen pendidikan islam, adapun maksud dan tujuan pengawasan dan pengendalian adalah :

- 1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak
- 2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kesalahan yang sama.
- 3) Untuk mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 4) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
- 5) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan yang telah ditetapkan dalam *planning*.
- 6) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan.

Pengawasan memiliki fungsi mengawasi perencanaan keuangan dan pelaksanaan penggunaan keuangan. Walaupun perencanaan yang baik telah ada, yang telah diatur dan digerakan, belum tentu tujuan dapat dicapai, sehingga masih perlu ada pengawasan. Pengawasan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan. Apakah pelaksanaannya telah tepat dan telah menduduki tempat yang tepat ? apakah cara bekerjanya telah betul dan aktivitasnya telah berjalan sesuai dengan pola organisasi ? Kalau terjadi kesalahan dan penyimpangan, maka segera

diperbaiki. Oleh sebab itu, setiap manajer pada setiap tingkatan organisasi berkewajiban melakukan pengawasan.

Dalam Alqur'an terkait dengan pengawasan Allah berfirman :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya : “dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan” (Q.S. Al-An'am (6):132).¹²⁷

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan :

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : pertama melakukan inventarisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya,

¹²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30* Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), h. 195.

kedua melakukan inventarisasi sumber pembiayaan, ketiga menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS). Langkah – langkah ini sesuai dengan teori perencanaan keuangan sekolah yang disampaikan oleh Utari.

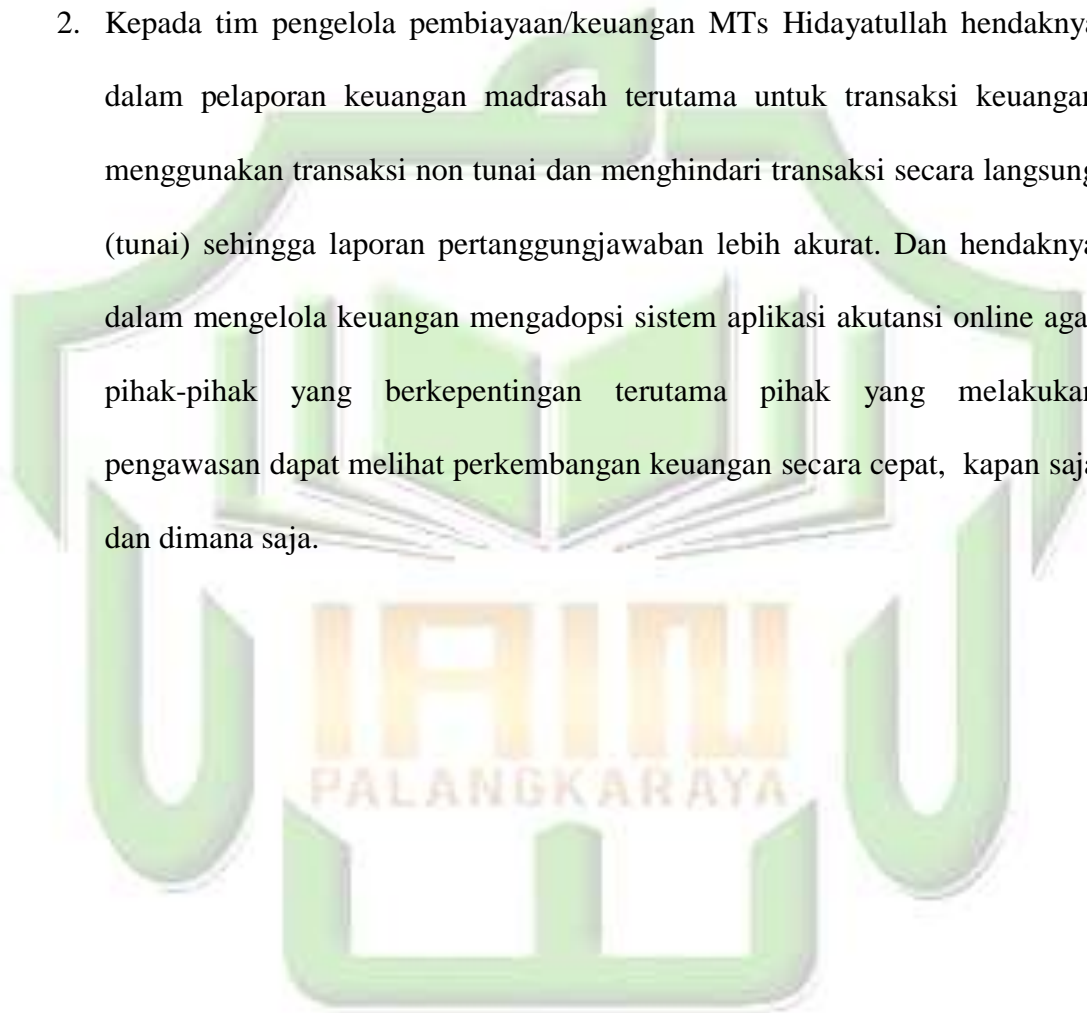
2. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilakukan dalam dua kegiatan yaitu pembelanjaan dan pembukuan keuangan sekolah. Kegiatan pembelanjaan keuangan sekolah mengacu kepada rencana yang sudah ditetapkan dalam RKAM, dana digunakan secara hemat, efektif dan efisien. Kegiatan pembukuan keuangan sekolah dilaksanakan oleh bendahara, dengan mencatat seluruh transaksi keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran dana yang didukung oleh dokumen keuangan seperti nota, kwitansi, dan daftar tanda terima. Pembukuan keuangan MTs Hidayatullah terdiri dari Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu Pajak (BPP). Kegiatan pelaksanaan ini sesuai dengan pendapat Imam Gunawan Sekolah setelah menetapkan RKAS menjadi anggaran sekolah, dengan memperhatikan persentase pendistribusian anggaran kepada setiap mata anggaran, selanjutnya sekolah melaksanakan pembelanjaan keuangan sekolah dan setiap transaksi dicatat dalam pembukuan keuangan sekolah serta bukti – bukti penggunaan anggaran disimpan sebagai bahan laporan keuangan sekolah.
3. Pengendalian/Pengawasan pembiayaan pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala kabupaten Pulang Pisau sudah dilaksanakan, baik oleh kepala madrasah dan dari pihak pemberi dana yaitu Kementerian Agama

Kabupaten Pulang Pisau dan Irjen Kementerian Agama RI, namun pengawasan dari masyarakat tidak dilaksanakan terutama dari komite madrasah sebagai perwakilan dari masyarakat. Pengawasan oleh kepala madrasah dilakukan setiap triwulan, dari Kemenag dua kali setahun. Pengawasan dilakukan dengan cara mengecek, memonitor, meneliti dan mengawasi semua tugas dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan perencanaan dan dilakukan dengan hemat, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengawasan tersebut sesuai dengan teori Matin tentang pengawasan yaitu pengawasan penggunaan anggaran pendidikan adalah merupakan aktivitas-aktivitas melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan program-program pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terhadap Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MTs Hidayatullah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau, maka peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Madrasah agar membuat usaha yang dikelola sendiri oleh madrasah seperti usaha tambak ikan, peternakan, kantin madrasah dan koperasi madrasah, sehingga dapat membantu pendanaan pendidikan di MTs Hidayatullah dan tidak hanya bergantung kepada dana dari pemerintah saja.
2. Kepada tim pengelola pembiayaan/keuangan MTs Hidayatullah hendaknya dalam pelaporan keuangan madrasah terutama untuk transaksi keuangan menggunakan transaksi non tunai dan menghindari transaksi secara langsung (tunai) sehingga laporan pertanggungjawaban lebih akurat. Dan hendaknya dalam mengelola keuangan mengadopsi sistem aplikasi akuntansi online agar pihak-pihak yang berkepentingan terutama pihak yang melakukan pengawasan dapat melihat perkembangan keuangan secara cepat, kapan saja dan dimana saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin Arif, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Kultura, Jakarta, 2008.
- Arwildayanto, Lamatenggo Nina dan Sumar Tune Warni, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2017.
- Ahmadi Rulam, *Memahami Melode Penelitian Kualiiati*, Malang; Universitas Negeri Malang, 2005.
- Anwar Syarifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Buseri Kamrani, *Administrasi Manajemen Pendidikan Islam, Paradigma, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, 2017.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Juz 1-30* Jakarta: CV. Nala Dana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu Untuk Kepala Sekolah*, Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, 2003.
- Daridjat Tubagus Achmad, *Konsep-Konsep Dasar Manjemen Personalia Masa Kini*, Bandung : PT. Reflika Aditama, 2015.
- Dirjen Pendidikan Islam, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Departemen Agama RI, 2007.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Fattah, Nanang, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, PT.Remeaja Rosda Karya, Bandung, 2012.
- Fattah, Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012
- Gunawan Imam dan Djum Djum Noor Benty, *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktek*, Bandung : Alfabeta, 2017.

- Hadi Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Hermiono Agustinus, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan: Tinjauan perilaku organisasi menuju Comprehensive Multilevel Planning* (Jakarta: Gramedia, 2013).
- Kompri, *Standardisasi Kompetensi Kepala Sekolah: Pendekatan Teori Untuk Praktik Profesional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan : Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan sekolah/Madrasah*, Jakarta, 2011.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Mulyasa E, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya*, Depok: Rajawali Grafindo Persada , 2014.
- Mujamil, Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, Airlangga, Jakarta, 2007.
- Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat*, dalam *Educational Management*, Vol.1, No.1, Juni 2012, diakses tanggal 18 Oktober 2018 pukul 07.30 dalam <http://journal.unnes.ac.ad.sju/index.php.eduman>.
- Moleong J Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mathew B, Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohena Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Nadya Shofi Hayik, *Manajemen Pembiayaan Lembaga Dalam Meningkatkan Eksistensi dan Daya Saing Sekolah (Studi Multi Kasus di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dan MTs Al Ma'arif Pondok Panggung Tulungagung*, Tesis tidak diterbitkan, Tulungagung: IAIN Tulung Agung, 2016

- Ocdon, Dedi Achmad Kurniady, Deni Darmawan, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Badung: PT.Remaja Rosdakarya, 2017
- Ramayulis, *Manajemen Pendidikan Islam*, Jakarta, 2008
- Robbins P Stephen and Coulter Mary, *Management Eleventh Edition, America* : Prentice Hall, 2012
- Rangkuti Hariyanto, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan” dalam https://www.kompasiana.com/har_rangkuti/54f67ce4a33311b07d8b4ddc/manajemen-pembiayaan-pendidikan, diakses pada 9 November 2018 pukul 21.27 WIB.
- Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Supriadi Dedi, *Satuan Biaya Pendidikan SD, SLTP, SMU*, Jakarta, 2001.
- S. Ahmad, Kosep Dasar Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan, dalam <http://akhmad sudrajat.wordpress.com/2010/01/18>, 5 November 2018. Pkl.19.00.wib.
- Sagala Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sinungan Muchansyah , *Dasar-Dasar Manjemen Kredit*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.
- Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep Strategi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Saifudin Yahya S, *Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi Situs di MTs Ma'arif Sudimoro dan MTs Satu Atap Misbahul Jannah Sudimoro Kabupaten Pacitan)*, Tesis tidak diterbitkan, Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2013.
- Soegito, H.A.T, *Pergeseran Paradigmatik Manajemen Pendidikan*, WidyaKarya, Semarang, 2008.
- Tarmizi, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Melalui Bantuan Operasional Sekolah pada MIN Cempala Kuneng Kabupaten Pidie*”, dalam <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/article/view/2595/2449>, 16 November 2018
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, Bandung Alfabeta, 2010

- Trianto, *Pengantar Penelitian bagi pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga kependidikan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional dalam Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Dirjen Pendidikan Islam Dep.RI, 2007.
- Usman Husaini, *Manajemen : Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Usman Nasir, Murniati, Asfila, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, volume 3, No.4, ISSN 2302.
- U, KH, Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Wijaya David, *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah*, Jakarta: Jurnal Pendidikan Penabur, 2009.
- Zahroh Aminatul, *Total Quality Management*, Yogyakarta, 2014.